



• TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 •

# info indonesia

MINGGU | OKTOBER 2023

Harga @ Rp 20.000,-



Road to  
Election  
2024



## KAESANG ANAK JOKOWI DUKUNG GANJAR ATAU PRABOWO?

KPU MAKIN  
TERTUTUP  
BAHAYA UNTUK  
DEMOKRASI

GANJAR  
SIAP-SIAP  
JADI  
CAWAPRES

PRABOWO  
MASIH  
MENGINCAR  
GIBRAN

PSI  
MENGGERUS  
SUARA  
PDIP

PBB MASIH  
TERANCAM  
GAGAL KE  
PARLEMEN

KAESANG  
KETUM PSI  
UNTUK  
JOKOWI





“Solusi tercepat memang Kaesang harus berharap Presiden Jokowi turut membantunya, baik sebagai ayah dan penguasa politik, untuk membantu melakukan desain strategi politik agar PSI lolos di parlemen”

*Efriza*



## Dinasti

**P**enunjukkan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2023-2028 mendapatkan perhatian besar dari publik.

Masuknya Kaesang sebagai kader PSI membuat Jokowi beserta anak dan mantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, yang merupakan kader PDIP menjadi sorotan.

PDIP selama ini dikenal sebagai partai yang tegas terhadap kadernya. Salah satunya tak mengizinkan kadernya memiliki keluarga yang menjadi kader partai lain. Salah satunya saat PDIP memecat Murad Ismail, Gubernur Maluku, yang istrinya beralih menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, saat Kaesang jadi kader, bahkan Ketua Umum PSI, PDIP seakan tak berani memberikan tindakan kepada Jokowi, termasuk Gibran dan Bobby.

Dipilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI juga dikaitkan dengan isu Jokowi yang tengah membangun dinasti politiknya. Tak Cuma Kaesang, Gibran dan Bobby, ipar Jokowi, yakni Anwar Usman, kini adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

PDIP sendiri menyerahkan isu Jokowi yang membangun dinasti politik kepada publik. Di tengah meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerjanya, Jokowi seakan ingin menunjukkan kuasanya di dunia politik Tanah Air.

Kehadiran Kaesang di PSI juga dinilai akan bisa memecah suara pemilih PDIP dan membuat partai anak muda itu lolos ambang batas parlemen 4 persen.

Info Indonesia edisi minggu pertama Oktober 2023 juga menyajikan analisis mengenai peta persaingan capres-cawapres menuju pendaftaran ke KPU, 19-25 Oktober 2023.

Anies dan Cak Imin menjadi perhatian setelah menghadiri acara di kediaman Habib Rizieq Shihab. Lalu, Ganjar dikabarkan telah membuat SKCK untuk pendaftaran capres dan cawapres. Ganjar pun diindikasikan tengah bersiap jika pada akhirnya hanya menjadi cawapres.

Di sisi lain, Prabowo Subianto disebut masih menginginkan Gibran Rakabuming sebagai pendampingnya mengingat gugatan batas usia capres-cawapres masih berjalan di MK.

Menjelang Pemilu Serentak 2024, Mendagri Tito Karnavian meminta jajaran Polri memetakan potensi konflik di masyarakat. Selain itu, Polri juga diminta untuk tidak menyukai, komen, dan membagikan unggahan yang berhubungan dengan caleg atau capres tertentu.

Dari legislatif, DPR memutuskan memilih Arsul Sani sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Arsul yang merupakan anggota Komisi II dan Wakil Ketua MPR itu membuat adanya konflik kepentingan DPR di dalam tubuh MK.

Informasi terkait Pilkada Serentak juga terus kami sajikan untuk memberikan gambaran kondisi politik di daerah. Mereka yang akan maju di Pilkada terus mencari dukungan masyarakat.

Masih banyak informasi dan analisis menarik yang kami sajikan di Info Indonesia edisi minggu pertama Oktober 2023. Selamat membaca!!!



**info indonesia**  
INOVASI UNTUK NEGERI

INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung PT. DUA SATU PRO  
Sertifikat Dewan Pers  
Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

**PENDIRI/ DIREKTUR** : Usman Rizal

**PEMIMPIN PERUSAHAAN**: Adam Aulia Manzan Khan **PEMIMPIN REDAKSI**: Rusdiyono **WAKIL PIMPINAN REDAKSI**: Rahmad Romli

**REDAKTUR PELAKSANA**: Irmayani **REDAKTUR**: Rio Taufiq Adam, Fonda Lapod, Rusdy Setiawan Putra, Irmayani, Rusdiyono, Nina

Erlina **REPORTER**: Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto,

M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir **EDITOR & GRAFIS**: Al Amin, Achilles **TATA LETAK**: Sujatmiko **MEDIA SOSIAL**: Haidir Ali

**KEUANGAN** : Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI**: Nur Aisah **PENGEMBANGAN BISNIS**: M. Iqbal, Zul Fahmi **ADMINISTRASI**:

Ega Tri Gustina **DISTRIBUSI**: Abdul Mughtar

**HARGA IKLAN**: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.

1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-

**BANK ACCOUNT**: \*A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur **ALAMAT REDAKSI/IKLAN/**

**PEMASARAN**: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 **TELP** 021-

791 96781 **FAX** 021-791 96786 **PALEMBANG** Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I

Palembang 30126 **TELP** : 0711-7442344





“Ya tentu ini bagian daripada pendekatan pasangan Amin dengan Habib Rizieq”

Ujang Komarudin

# INFO PILPRES

Minggu I • Oktober 2023

3

## CARI DUKUNGAN HABIB RIZIEQ AMIN BAKAL DITINGGAL MASSA NU

**Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengundang perhatian publik setelah pertemuannya dengan Habib Rizieq Shihab (HRS) viral. Mungkin-mungkin pertemuan itu untuk mencari dukungan dari Rizieq dan PA 212 yang mendukung Anies di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017?**

**A**dapun pertemuan duet pasangan Amin dengan mantan Imam Besar FPI itu terjadi saat keduanya menghadiri pernikahan putri HRS di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 27 September 2023. Keduanya menjadi saksi nikah dari putri HRS.

Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid. Dia menyampaikan bahwa pasangan capres-cawapres dari Koalisi Perubahan itu memang diundang untuk menjadi saksi pernikahan putri HRS.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyebut, Anies dan Cak Imin tidak datang bersama, namun secara terpisah.

“Keduanya diundang dan kebetulan bersamaan waktu kehadirannya. Tidak ada janji-janji, ketemu secara alami,” ucap Taslim.

Dia menegaskan, kehadiran Anies dan Cak Imin di kediaman HRS hanya untuk menghadiri pernikahan. Dia menegaskan, tidak ada pembahasan mengenai Pilpres. “Tidak ada kaitan dengan 2024. Jadi, bukan pertemuan, bukan rapat,” tegas Taslim.

Ketua DPP PKB, Lukmanul Hakim, juga mengklaim, pertemuan Amin dengan Rizieq tidak membahas soal perpolitikan Tanah Air. Kata dia, Amin hanya menghadiri undangan dari HRS.

“Jadi, bukan pertemuan politik punya agenda khusus,” jelas Lukmanul Hakim.

Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menyampaikan, kehadiran Anies di kediaman HRS untuk memenuhi undangan sebagai saksi nikah. Dikatakan Angga, Anies juga kerap kali menghadiri acara pernikahan yang diadakan warga.

“Semua didatangi karena Bapak menghormati dan tidak pernah membedakan orang lain,” kata Angga.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menuturkan, pertemuan antara Anies-Cak Imin dengan HRS tidak bisa dianggap sebagai bentuk dukungan yang diberikan PA 212 terhadap pasangan tersebut.

“Pertemuan dan kehadiran pasangan Amin di beberapa momen dengan Habib Rizieq belum harga mati itulah adalah dukungan,” kata Hari kepada Info Indonesia, Kamis, 28 September 2023.

Hari menuturkan, suksesi PA 212 yang mendukung Anies Baswedan hingga



menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017 sulit terulang di Pilpres 2024. “Tidak bisa menjadi ukuran untuk memenangkan duet Anies-Cak Imin,” jelas Hari.

Meski PA 212 sudah menyatakan tidak akan mendukung pencapresan Prabowo Subianto, hal itu masih belum dapat dipastikan. Sebab, akar rumput PA 212 pastinya memiliki sikap yang berbeda dengan para petinggi di kelompok Islam tersebut.

“Belum bisa dipastikan utuh sampai ke grassroot,” jelas Hari.

Hal itu juga bakal terjadi pada pasangan Amin. Kata Hari, sampai saat ini belum dapat dipastikan bahwa kelompok yang dulu dinamakan Front Pembela Islam (FPI) itu akan mendukung pencapres mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Dia memprediksi, PA 212 akan menentukan arah politik di 2024 pada saat penetapan capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kepastian dukungan akan dilihat setelah KPU membuka pendaftaran capres-cawapres dan kandidat terdaftar di KPU,” ucap Hari.

Dia memperkirakan, duet Anies dan Cak Imin masih memiliki peluang untuk berpisah di tengah jalan jelang pendaftaran capres-cawapres di KPU. “Bahkan, pasangan Amin masih memiliki peluang untuk berpisah, karena dalam politik tidak ada yang abadi hanya kepentingan taktis,” jelas Hari.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menyampaikan, pertemuan antara Anies dan Cak Imin dengan Habib Rizieq itu sebagai awal untuk melakukan pendekatan.

“Ya tentu ini bagian daripada pendekatan

pasangan Amin dengan Habib Rizieq,” kata Ujang kepada Info Indonesia.

Dia menyadari bahwa pengikut dan pendukung PA 212 akan mempengaruhi peta politik dukungan di Pilpres 2024. Sebab, para pengikut Habib Rizieq sangat besar.

“Bagaimanapun ya massa Habib Rizieq lumayan banyak untuk bisa dikerahkan untuk konteks Pilpres, untuk dukung mendukung,” jelas Ujang.

Kendati begitu, kata Ujang, peta dukungan dari PA 212 untuk capres yang berlaga di Pilpres 2024 belum bisa diketahui. Sebab, PA 212 juga masih menunggu paslon yang akan bertarung di konstelasi mendatang.

“Apakah memang nanti mendukung pasangan Amin? Ya kita lihat saja. Kita kan belum tahu terkait persoalan dukungan itu. Bisa iya, bisa juga tidak,” kata Ujang.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu menyampaikan, para capres yang akan bertarung di Pilpres 2024 pastinya akan melakukan lobi-lobi politik dengan PA 212. Hal itu dilakukan untuk mendapat dukungan dari masa PA 212.

Sebab, dukungan masa PA 212 sudah terbukti di Pilgub DKI Jakarta 2017. Mereka berhasil mengantarkan Anies Baswedan menduduki kursi DKI-1 kala itu. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa masa PA 212 akan terjadi tarik menarik.

“Apakah nanti PA 212 juga solid mendukung capres tertentu atau tarik sana-sini atau pecah? Kita lihat saja nanti ke depan, karena dalam politik semua serba mungkin. Mungkin mendukung Amin, mungkin juga tidak,” kata Ujang.

Dikatakan Ujang, peta politik PA 212 belum bisa ditebak. Sebab, alumni PA 212 saat Pilpres 2019 merupakan bagian dari pendukung Prabowo Subianto. Jadi, ada kemungkinan di Pilpres 2024 akan kembali mendukung Prabowo Subianto.

“Kita lihat, apakah bisa kembali ke Prabowo atau tidak. Ini kan harus dilihat. Karena di politik itu kan sifatnya cair, sifatnya tidak ada istilah harga mati. Semuanya bisa berubah kapanpun tergantung kepentingan dan deal politiknya seperti apa,” papar Ujang.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyebut pertemuan Amin dan HRS menjadi bukti kalau politik memang tidak mengenal batas atau sekat.

“Kalau pun dulu seakan HRS dekat Prabowo di pilpres, tapi kita tahu di 2017, FPI khususnya, memang berada di belakang gerakan politik Anies,” kata Adi.

Adi berpendapat, memang ada kecenderungan HRS dan pengikutnya untuk 2024 nanti lebih dekat mendukung Anies dibandingkan ke Prabowo. Bahkan, kecenderungan itu sudah ditunjukkan elite mereka yang kecewa dengan Prabowo.

Terutama, atas keputusan Prabowo menjadi menteri pertahanan di bawah pemerintahan Joko Widodo. Adi menuturkan, tidak sedikit dari pengikut HRS yang sudah menyampaikan kepada publik mereka sudah tidak lagi menjadi bagian dari Prabowo.

“Jadi, tidak mengherankan kalau untuk 2024, HRS sangat mungkin mendukung Anies,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia tersebut.

Meski begitu, Adi melihat, banyak publik yang tertarik melihat kehadiran Cak Imin. Terlebih, basis konstituen PKB yang mayoritas memang Nahdliyin selama ini berhadapan dan berseberangan dengan HRS dan pengikutnya.

“Ini tentu semua karena urusan politik, jadi politik memang mencari semua, politik bisa mempertemukan segalanya, setidaknya pada level PKB, Muhaimin bisa duduk bersama bisa hadir di pernikahan anak HRS,” kata Adi.

Dia merasa, pertemuan itu merupakan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan publik sebelumnya. Setelah ini, Adi menekankan, yang paling dinantikan tentu sikap pendukung PKB di bawah atas kedekatan pasangan Amin dan HRS.

Pasalnya, dari sisi pendukung Anies sudah sangat terbiasa, bahkan banyak yang memang beririsan dengan pengikut HRS. Selain itu, cukup banyak pendukung Anies selama ini yang terafiliasi dengan HRS dan pengikutnya.

Padahal, menurut Adi, selama ini memang HRS dan pengikutnya sangat berjarak secara diametral dan saling berhadapan dengan NU. Artinya, ada tembok besar dan tebal yang memisahkan HRS dan pengikutnya dengan NU.

“Dua kutub yang selama ini berbeda, itu spekulasi politik yang bisa kita saksikan ke depan, apakah pendukung Muhaimin Iskandar yang mayoritas NU itu tidak memersoalkan pertemuan ini atau justru membuat mereka marah,” ujar Adi. ●RDO





“Jika melihat maraknya deklarasi mendukung Gibran sebagai cawapres, tentu wajar jika masyarakat menilai bahwa gugatan ke MK ada sangkut pautnya dengan hal tersebut”

Ade Reza Hariyadi



# PRABOWO MASIH MENGINCAR GIBRAN

**Kesan politik dalam gugatan norma batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden menguat. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penguji undang-undang dianggap disetir rezim untuk kepentingan Pilpres 2024.**

Bahkan, muncul kesan perkara 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah adalah untuk memuluskan langkah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Bertepatan dengan itu, Prabowo hingga hari ini masih belum memberikan tanda-tanda cenderung kepada satu sosok untuk menjadi cawapres yang mendampinginya. Sebab, dari beberapa nama tokoh yang muncul, seperti Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid yang merupakan putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), t a k

lagi menge-muka di publik. Jus-tru, wa-cana yang

berkembang adalah menggantungnya putusan MK terhadap uji materiil norma batas usia minimum capres-cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Karena beberapa pihak memperkirakan para Hakim Konstitusi akan sepakat dengan tuntutan PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah yang berkedudukan sebagai Pemohon Perkara.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK mengubah syarat usia terendah capres-cawapres adalah 35 tahun. Sehingga, jika MK sepakat dengan dalil permohonan PSI, Partai Garuda, dan para kepala daerah, maka norma yang terdapat di dalam UU Pemilu itu akan lebih rendah dari yang disyaratkan sebelumnya, yaitu minimal umur untuk dua posisi itu 40 tahun.

Fenomena tersebut mendapat sorotan dari pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi, yang menilai MK tengah dijadikan alat politik bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki kendali terhadap kekuasaan. Karena, dia mengamati sidang uji materiil perkara norma batas usia minimum capres-cawapres sudah selesai, dan penyerahan kesimpulan telah dilakukan pihak-pihak terkait pada awal September.

Sehingga, dia mengatakan terkatung-katungnya penentuan cawapres Prabowo tak terlepas dari situasi politik yang semakin memanas belakangan ini. Dimana, MK menjadi salah satu alat politik untuk mempertahankan kekuasaan.

“Dalam situasi

tahap Pemilu, gugatan ke MK harus dilihat dalam konteks kontestasi antar kepentingan politik dari berbagai pihak. Tentu saja ada kepentingan politik yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat jika batas usia capres-cawapres diturunkan,” ujar Ade Reza kepada Info Indonesia, Kamis, 28 September 2023.

Dia menerangkan, seharusnya MK tidak masuk terlalu dalam terhadap gugatan yang berbau politis. Dikatakan Ade Reza, mengenai gugatan batas usia merupakan wewenang dari DPR sebagai pembentuk Undang-Undang.

“MK semestinya konsisten sebagai guardian of the constitution dengan menaati bahwa hal teknis mengenai masalah Pilpres, termasuk penentuan syarat usia capres/cawapres, merupakan open legal policy yang menjadi ranah dari pembuat UU, yakni DPR,” jelas Ade Reza.

Dia menyampaikan, MK seharusnya bisa langsung putusan hasil gugatan tersebut. Sebab, seluruh proses persidangan sudah berakhir. Bahkan penyerahan kesimpulan telah diserahkan pihak-pihak terkait pada awal September lalu.

“Karena itu, tidak ada masalah konstitusionalitas dalam isu batas usia capres yang terkait dengan kewenangan MK,” kata Ade Reza.

Disampaikan Ade Reza, lembaga yang dipimpin ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, seharusnya bisa segera mengumumkan putusan MK terhadap gugatan terkait batas usia capres-cawapres. Tidak hanya itu, MK hanya berhak memutus UU yang bermasalah atau yang melanggar konstitusi.

Terkait gugatan batas usia minimum capres-cawapres ini, lanjut Ade Reza, sangat tidak berkaitan dengan konstitusi.

Seharusnya, MK dapat dengan segera mengeluarkan putusan tersebut dalam waktu dekat.

“Konsistensi ini akan menunjukkan bahwa MK merupakan lembaga yang punya integritas dan tidak tunduk pada kepentingan politik selain konstitusi itu sendiri,” ujar Ade Reza.

Dia memprediksi ada pihak-pihak tertentu yang ingin aturan batas usia minimum capres-cawapres itu diturunkan. Kendati begitu, aktor di balik itu, batang hidungnya belum terlihat sampai saat ini.

“Bisa siapa saja berkepentingan,” sambung Ade Reza.

Setelah banyak pihak yang mengajukan gugatan MK, kata Ade Reza, lalu muncul berbagai macam kelompok masyarakat yang menggaung-gaungkan untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres di Pilpres 2024.

Bahkan, pasca gugatan uji materiil mengenai batas usia minimum capres-cawapres, muncul wacana duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sehingga, setelah itu masyarakat menganggap bahwa ada kepentingan dari uji materiil tersebut.

“Jika melihat maraknya deklarasi mendukung Gibran sebagai cawapres, tentu wajar jika masyarakat menilai bahwa gugatan ke MK ada sangkut pautnya dengan hal tersebut,” kata Ade Reza.

Dia meyakini gugatan mengenai batas usia minimum capres-cawapres ini uji materiil yang bersifat politis. Dia juga mengatakan bahwa ada upaya untuk mempolitisasi MK dalam mengambil keputusan terjadi uji materiil tersebut.

Politisasi terhadap MK semakin menguat setelah ada beberapa calon Hakim MK yang berasal dari unsur DPR seperti Asrul Sani. Adanya Hakim MK dari unsur DPR ini nantinya akan menimbulkan tanda tanya besar dari publik.

Dengan begitu, masyarakat atau publik semakin percaya bahwa MK saat ini menjadi lembaga yang turut secara dalam kegiatan politik praktis.

“Tentu saja akan selalu ada upaya ke arah sana dari pihak-pihak yang berkepentingan,” jelas Ade Reza.

Kendati begitu, Ade Reza menilai belum ada indikasi bahwa gugatan batas usia minimum capres-cawapres itu untuk mengakomodir kepentingan Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi belum terlintas menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi putusan uji materiil tersebut. Meskipun, Ketua MK merupakan adek ipar Presiden Jokowi.

Menurutnya, saat ini banyak tantangan perlu dihadapi MK, termasuk berkaitan dengan gugatan batas usia minimum capres-cawapres. Sebagai lembaga mengawal konstitusi, MK harus lepas dari kepentingan politik siapapun termasuk dari Istana.

“Inilah tantangan bagi MK untuk dapat bekerja selurus-lurusnya dalam menjaga konstitusi dan ideologi negara,” pungkas Ade Reza. ●RDO







“Dalam politik semua masih serba mungkin, termasuk untuk menduetkan Prabowo dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 karena belum ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan capres dan cawapres”

**Fernando Emas**

# GANJAR SIAP-SIAP JADI CAWAPRES

**Bakal calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo, kembali ramai jadi perbincangan publik, terutama di media sosial, setelah disebut-sebut membuat dua Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sekaligus sebagai capres dan cawapres. Hal itu mengundang perhatian, meski sudah ditunjuk sebagai capres, namun juga menyiapkan diri jika menjadi cawapres.**

Diketahui SKCK memang menjadi salah satu syarat untuk pendaftaran capres ataupun cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadwalkan pada akhir Oktober mendatang. Adapun penerbitan SKCK dikeluarkan oleh Badan Intelijen dan Keamanan Polri.

Kabar Ganjar membuat dua SKCK itu diungkapkan oleh Ketua Relawan Prabowo Mania, Immanuel Ebelezer. Tak lama berselang, kabar itu ramai disorot publik. Apalagi, belum lama ini juga muncul simulasi yang memasangkan Prabowo Subianto yang merupakan capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan Ganjar Pranowo.

Dalam keterangannya, pria yang akrab disapa Noel itu mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sangat mungkin bergabung dalam menjajaki persaingan ketat di Pilpres 2024.

Wacana bergabungnya Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024 sebenarnya merupakan isu lama yang kini dimunculkan kembali. Sebelumnya sempat mencuat isu dua poros dalam Pilpres 2024, yakni Prabowo-Ganjar dan Anies-Cak Imin.

Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas, menilai, munculnya isu Ganjar membuat dua SKCK untuk mendaftar sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024 sangat mungkin terjadi lantaran adanya wacana Pilpres hanya akan diikuti oleh dua poros.

Fernando mengatakan, isu itu dilontarkan langsung oleh Noel yang diketahui sebelumnya juga memiliki hubungan dekat dengan Ganjar ataupun Jokowi.

Dia menyebut, isu itu kemungkinan bisa terjadi lantaran sejumlah elit PDIP memiliki kalkulasi dan analisis jika duet Prabowo-Ganjar terwujud di Pilpres 2024, maka kemungkinan kemenangan akan terjadi.

“Apalagi kalau berdasarkan kalkulasi dan analisis peluang kemenangan semakin besar apabila menduetkan Prabowo dengan Ganjar,” kata Fernando, Jumat, 29 September 2023.

Menurut Fernando, pembuatan dua

SKCK yang diduga dilakukan oleh Ganjar kemungkinan juga telah mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Hal itu lantaran Megawati sejauh ini merupakan sosok king maker dalam pengambilan keputusan di internal PDIP.

Selain itu, pembuatan dua SKCK yang dilakukan Ganjar dinilai juga merupakan manuver politik PDIP untuk membentuk dua poros dalam Pilpres 2024.

“Jadi pengurusan SKCK yang dilakukan oleh Ganjar tentu setelah mendapatkan arahan dari Megawati, termasuk mempersiapkan dua SKCK untuk persyaratan sebagai capres atau cawapres. Tidak mungkin Ganjar mempersiapkan SKCK untuk persyaratan sebagai capres atau cawapres tanpa arahan dari Megawati,” ungkap Fernando.

Fernando mengungkapkan, pembentukan dua poros dalam Pilpres 2024 kemungkinan akan terjadi karena sebelumnya sejumlah elit politik sudah mulai melontarkan isu tersebut. Jika Pilpres 2024 hanya ada dua poros, maka akan semakin menguntungkan kubu PDIP dan Prabowo untuk meraup kemenangan.

“Upaya untuk membuat dua poros juga sudah dikemukakan oleh beberapa elit politik, seperti Aria Bima dari PDIP dan Jazilul Fawaid yang merupakan Wakil Ketua Umum PKB,” ungkap Fernando.

Fernando menambahkan, wacana duet Prabowo Ganjar ataupun dua poros dalam Pilpres 2024 bisa saja terjadi karena dinilai dapat menghemat anggaran dari APBN. Namun, munculnya wacana dua poros itu dapat menjadi buah simalakama lantaran memunculkan kembali suasana politik identitas.

“Dalam politik semua masih serba mungkin, termasuk untuk menduetkan Prabowo dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 karena belum ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan capres dan cawapres,” tutur Fernando.

“Apalagi, beberapa waktu lalu Megawati dan Prabowo duduk satu meja dalam sebuah acara, sangat mungkin dalam pertemuan tersebut ada pembahasan dan ada kesepakatan untuk menduetkan Prabowo dengan Ganjar,” imbuh Fernando.

Sementara itu, pengamat politik Citra institute, Yusak Farchan, menilai, isu Ganjar membuat dua SKCK untuk kepentingan mendaftar menjadi capres dan cawapres kemungkinan hanya spekulasi yang harus

dibuktikan secara nyata.

Yusak menilai, kepolisian saat ini ingin-nyakan bahwa telah menerbitkan empat buah SKCK yang nantinya masing-masing digunakan oleh Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar.

Berdasarkan hal itu, informasi Ganjar membuat dua SKCK kemungkinan bisa benar atau hanya spelukasi lantaran sebagai usaha untuk mengupayakan perijodohan Prabowo dan Ganjar.

“Spekulasi 2 SKCK Ganjar bisa saja benar, bisa saja keliru. Usaha menjodohkan Ganjar dengan Prabowo kan memang sudah lama itu, bahkan sempat redup,” kata Yusak.

Yusak mengatakan, meski wacana duet Prabowo-Ganjar saat ini dimunculkan kembali, namun perijodohan antara keduanya kemungkinan akan sulit terwujud lantaran PDIP dan Gerindra bakal sama-sama ngotot untuk mengejar posisi capres.

“Wacana itu muncul kembali seiring dengan peta politik pilpres yang berkembang. Tapi sejauh ini, PDIP dan Gerindra masih sama-sama ngotot untuk posisi capres. Jadi agak rumit formulanya karena tidak ada yang mau mengalah sebagai cawapres,” ungkap Yusak.

Namun, Yusak menilai, wacana duet Prabowo Ganjar bisa saja terwujud sepanjang Megawati merestui perijodohan tersebut. Di sisi lain, wacana duet itu kini kembali muncul lantaran koalisi PDIP ataupun KIM masih belum yakin akan menang jika menghadapi Pilpres dua putaran.

Sebab, elektabilitas Ganjar, Prabowo atau Anies yang sejauh ini resmi diusung menjadi kandidat bakal capres dinilai belum ada satupun yang bisa menyentuh angka menang satu putaran dalam Pilpres 2024.

Yusak juga melihat, sejak diusung menjadi capres, baik Prabowo maupun Ganjar sejauh ini elektabilitasnya masih bersaing secara kompetitif dan belum mampu menyentuh angka di atas 50 persen. Dengan begitu, wacana Pilpres satu putaran sulit akan terwujud jika keduanya tidak bergabung untuk menghadapi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Yusak menambahkan, wacana duet Prabowo dan Ganjar kemungkinan bakal terwujud karena PDIP ataupun Gerindra juga akan menghindari terjadinya Pilpres dua putaran. Sebab, Pilpres dua putaran akan menghabiskan energi bagi seluruh kandidat capres dan cawapres.

“Dalam konteks penguatan demokrasi, hadirnya lebih dari dua pasang calon sebenarnya sangat positif karena masyarakat diberikan ruang alternatif pilihan yang lebih banyak. Kalau dua poros, potensi terjadinya polarisasi justru tinggi sekali seperti Pemilu 2019,” tandas Yusak..●RDO





“Dia (Bawaslu) serius menggugat atau hanya formalitas. Mestinya kan dia bukan minta komisioner (KPU) diberhentikan, karena ini pelanggaran prinsip soal transparansi yang tidak dilakukan penyelenggara”

*Jeirry Sumampow*



# BAWASLU CUMA FORMALITAS

**Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap keputusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) soal dugaan pelanggaran etik pembatasan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat sesuai dengan problematika teknis yang terjadi.**

Hal itu menyusul dalam waktu dekat proses tahapan Pemilu telah memasuki penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) bakal calon anggota legislatif dan pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang digelar pada Oktober 2023.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan, pihaknya saat ini secara politik masih menunggu hasil putusan sidang DKPP terkait dibatasinya Bawaslu dalam mengakses Silon bakal caleg oleh KPU. Lolly menegaskan akan tetap menghormati apapun putusan yang nanti dikeluarkan oleh DKPP dalam kasus dugaan perkara etik KPU tersebut.

“Apapun hasilnya, maka secara kelembagaan, Bawaslu tentu akan menghormati. Jadi ini tinggal menunggu detik-detik putusan DKPP akan seperti apa,” ungkap Lolly, Rabu, 27 September 2023.

Lolly berharap keputusan itu akan keluar sebelum kegiatan penyusunan DCT dan pendaftaran bakal capres-cawapres digelar. Hal itu karena keputusan DKPP juga berpengaruh terhadap Bawaslu dalam melakukan pengawasan mengakses informasi dari dua kegiatan tersebut.

“Ini akan berpengaruh terhadap akses informasi kita terhadap berkas pencalonan presiden dan wapres. Juga akan mempengaruhi akses kita terhadap penyusunan DCT. Kita secara politik sedang menunggu putusan DKPP berkenaan dengan keterbatasan akses informasi Bawaslu terhadap KPU,” terang Lolly.

Lolly menambahkan, hasil putusan sidang DKPP perihal dugaan pelanggaran etik diharapkan dapat sesuai dengan upaya kritik Bawaslu terhadap KPU, yakni agar dibukakan akses secara keseluruhan terkait Silon.

“Mari kita tunggu. Mudah-mudahan semesta ini mendukung terhadap upaya yang saat ini telah dijalankan Bawaslu,” kata Lolly.

Koordinator Komite Pemilihan Indonesia, Jeirry Sumampow, juga berharap keputusan sidang terkait dugaan pelanggaran administrasi KPU soal Silon dapat membantu tugas pengawasan dalam penyusunan DCT bakal caleg serta jadwal pendaftaran capres dan cawapres.

Pria yang akrab disapa Jeirry itu menilai, gugatan yang dilayangkan oleh Bawaslu selaku pelapor dan KPU sebagai terlapor sudah tepat. Sebab, KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu harusnya memberikan akses seluas-luasnya untuk Bawaslu mengakses Silon bakal caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selain itu, Jeirry menyebut, prinsip keterbukaan terhadap akses Silon itu harus dilakukan KPU lantaran masyarakat sebagai konstituen harus mengetahui latar belakang dari calon yang akan dipilihnya. Hal itu dilakukan agarnantinya Pemilu 2024 bukan hanya ajang beli kucing dalam karung.

“Nah, artinya data itu penting bagi para pemilih supaya enggak memilih kucing dalam karung. Sekarang malah KPU menutup. Maka itu sebetulnya gugatan ke Bawaslu sudah betul,” kata Jeirry, Kamis, 28 September 2023.

Kendati demikian, Jeirry menyoroti materi gugatan yang disampaikan ke DKPP mengenai dibatasinya akses Silon. Ia menilai, antara materi dengan tuntutan yang disampaikan Bawaslu dalam beberapa kali sidang digelar disinyalir bias atau kabur.

Sebab, menurut Jeirry, tuntutan Bawaslu yang meminta DKPP untuk memberhentikan sementara seluruh komisioner KPU imbas telah dibatasinya akses Silon dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan lantaran kabur dari substansi materi gugatan.

“Jadi kan

dalam kasus DKPP sebetulnya kita juga akan mempertanyakan keseriusan Bawaslu. Karena gugatannya itu kan dia minta KPU itu diberhentikan sementara. Nah, itu yang kurang cocok sebetulnya dalam penilaian saya. Makanya kita juga mempertanyakan keseriusan Bawaslu dalam gugatan itu,” terang Jeirry.

“Dia (Bawaslu) serius menggugat atau hanya formalitas. Mestinya kan dia bukan minta komisioner (KPU) diberhentikan, karena ini pelanggaran prinsip soal transparansi yang tidak dilakukan penyelenggara,” sambung Jeirry.

Jeirry mengatakan, berdasarkan pengalaman yang dijalani sebagai pemerhati pemilu, masalah Silon memang sudah terjadi sejak dahulu. Pada Pemilu 2019, KPU juga menutup akses Silon terhadap Bawaslu.

Jeirry menjelaskan, pada saat itu terdapat hal yang cukup menarik meski KPU menutup akses Silon. Pada Pemilu 2019, Bawaslu tetap memiliki hasil pengawasan soal dokumen para bakal caleg.

Berdasarkan hal itu, Jeirry pun mempertanyakan keseriusan Bawaslu dalam perkara ini. Sebab, jika serius, harusnya Bawaslu meminta DKPP agar memutuskan akses Silon dapat diakses oleh masyarakat.

“Kita punya pengalaman di masa lalu, Silon itu tidak pernah diberikan data-datanya, mengenai data detilnya pemilu yang lalu juga tidak. Nah, itu juga salah satu pertanyaan kita Pemilu lalu tidak, tapi Bawaslu punya hasil pengawasan,” ujar Jeirry.

“Sementara, yang dulu tidak diberikan Silon tapi keluar data hasil pengawasan pencalonan, DCS lah ya kan ada itu. Itu jadi pertimbangan. Pemilu yang lalu juga KPU menutup silon tidak memberikan data detilnya. Bawaslu ada hasil pengawasannya. Jadi itu akan menjadi pertimbangan DKPP,” ucap Jeirry.

Jeirry memprediksi dugaan pelanggaran etik di dalam kasus dibatasinya akses Silon itu, DKPP dalam menetapkan keputusan hanya sebatas peringatan keras ke KPU. DKPP tidak dapat mendesak untuk membuka akses Silon secara menyeluruh ke Bawaslu maupun ke masyarakat.

“Jadi menurut saya tanpa bermaksud untuk mendahului putusan, ya ini hanya peringatan. Ini mungkin hanya teguran atau peringatan, tapi sulit untuk membayangkan DKPP itu akan mengatakan KPU untuk membuka data Silon. Saya prediksi jadi ini hanya peringatan,” tandas Jeirry. ●RDO







“Saya pikir KPU harus menjadikan dirinya sebagai pelaksana dan penjaga demokrasi”

Kaka Suminta

INFO  
KPU

Minggu I • Oktober 2023

7

# KPU MAKIN TERTUTUP BAHAYA UNTUK DEMOKRASI

**Pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai serba tertutup oleh sejumlah pihak, memunculkan pertanyaan krusial di publik. Khususnya tentang eksistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang lahir dari perjuangan rakyat Indonesia di era peralihan orde baru melalui reformasi 1998.**

KPU merupakan jelmaan baru dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru, yang didirikan Presiden Soeharto pada 1970.

Namun dengan adanya reformasi, wajah lembaga penyelenggara pemilu menjadi bersifat nasional, tetap dan mandiri berkat amendemen ketiga UUD 1945, dan dijalankan Presiden ketiga RI BJ Habibie, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga mumpuni formatnya di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di era Presiden Habibie, KPU pertama menjabat pada 1999-2001 yang dibentuk dengan Keppres 16/1999. Saat itu, anggota KPU berisikan 53 orang yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik.

Sedangkan, masa peralihan kepemimpinan dan format KPU yang kedua berlangsung di era pemerintahan Presiden Gus Dur dengan mengeluarkan Keppres Nomor 10/P/2001. Saat itu, dipilih 11 orang sebagai anggota KPU untuk periode 2001-2007. Mereka di antaranya berasal dari unsur akademis dan LSM yang dilantik pada 11 April 2001.

Adapun KPU ketiga yang menjabat 2007-2012 dibentuk Presiden SBY berdasarkan Keppres 101/P/2007. Di masa ini, anggota KPU berisikan 7 orang yang diberlakukan hingga hari ini. Komposisinya, para anggota KPU berasal dari anggota KPU provinsi, akademisi, peneliti dan/atau birokrat.

Keberadaan KPU yang terus diperkuat dalam menjalankan tugas demokrasi di Indonesia selalu ditekankan dalam regulasi pemilu bahwa sifat kelembagaannya harus mematuhi dan memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, sebagaimana tertuang pula dalam UU 7/2017

tentang Pemilihan Umum.

Sayangnya, prinsip-prinsip tersebut seolah dikesampingkan oleh KPU yang kini dipimpin oleh petahana Hasyim Asy'ari yang sebelumnya menduduki posisi anggota yang mengepalai Divisi Hukum dan Pengawasan. Sebab, kebijakan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang diterapkannya bersifat tertutup dari segi data (close data policy).

Penerapan close data policy KPU yang paling disorot kelompok masyarakat sipil, salah satunya oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang berdiri sejak 15 Maret 1996 adalah soal sistem informasi pencalonan (Silon) untuk bakal calon anggota legislatif (caleg), baik DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun DPD RI.

Sekretaris Jenderal KIPP, Kaka Suminta, menjelaskan, kerja KPU periode 2022-2027 yang berwenang melaksanakan Pemilu Serentak 2024 menerapkan close data policy sejak tahapan pencalonan anggota legislatif dimulai pada awal Mei 2023.

Sebab, ia mendapati Silon sebagai instrumen pendaftaran bakal caleg tidak bisa diakses oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemantau dan/atau pegiat Pemilu seperti KIPP, bahkan masyarakat umum hingga penetapan daftar calon sementara (DCS) dan penyusunan daftar calon tetap (DCT) yang tengah berlangsung sekarang ini.

“Kalau merujuk UU Nomor 7 (Tahun 2017) tentang Pemilu tidak ada alasan (KPU menerapkan close data policy). Karena di situ tertulis prinsip penyelenggaraan Pemilu, di dalamnya juga ada transparansi dan akuntabilitas. Saya pikir KPU harus menjadikan dirinya sebagai

pelaksana dan penjaga demokrasi,” ujar Kaka kepada Info Indonesia saat dihubungi melalui sambungan telpon, Selasa, 26 September 2023.

Contoh konkret dari penerapan close data policy KPU dalam tahapan pencaleg dan akhirnya menimbulkan permasalahan di beberapa daerah pemilihan, adalah tidak terpenuhinya syarat dokumen bakal caleg yang diajukan parpol, yakni tentang keterpenuhan 30 persen bakal caleg perempuan di setiap dapil.

Kaka mengetahui, persoalan keterwakilan perempuan diklaim oleh 18 parpol peserta Pemilu Serentak 2024 telah memenuhi syarat kuota 30 persen. Fatalnya hal tersebut diamini oleh KPU. Padahal, kenyataannya, banyak parpol yang tidak dapat memenuhi syarat itu.

“Seperti kemarin, ada sengketa di Jawa Barat. Ternyata divisi teknisnya hanya menanganinya sendiri. Sementara divisi-divisi lain tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi. Akhirnya dari sengketa menjadi pelanggaran dugaannya. Ini kan serius ya. Pelanggaran administratif dilakukan KPU, kemudian disidangkan di Bawaslu setempat. Jangankan terbuka ke pihak luar, ke internal mereka di KPU saja tertutup. Kolektif kolegialnya tidak terbentuk,” sesalnya.

Kaka mengurai, kasus yang terjadi di Jawa Barat tersebut, tepatnya di salah satu dapil di Subang, mendapati keterpenuhan bakal caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari kalangan perempuan tidak mencapai 30 persen, sehingga muncul sengketa yang berujung terbukti pelanggaran Pemilu oleh KPU.

Dia berpandangan, masalah yang seperti itu bisa muncul ka-

rena penerapan close data policy KPU. Sehingga, azas koreksi yang semestinya bisa dilakukan masyarakat umum tidak berjalan. Malah memunculkan persoalan yang rumit serta menjadi problem tersendiri bagi KPU dalam menjalankan tugas-tugas lainnya.

“Saya pikir salah satu masalahnya karena masyarakat tidak dilibatkan. Ketika masyarakat tidak dilibatkan jadi semua hal diselesaikan di KPU dengan para peserta Pemilu. Ternyata di lapangan juga tidak semudah itu. Ada dispute antara KPU dengan para peserta, salah satunya adalah hilangnya dapil dan koreksi terhadap nama-nama di dapil yang di Jawa Barat itu juga menjadi problem. Seharusnya tidak ada banyak problem yang sebenarnya tak perlu terjadi, jika KPU membuka data itu lebih baik lagi,” tuturnya.

Kaka memproyeksi, ada beberapa tahapan lainnya dalam Pemilu 2024 yang terbelang penting ke depannya dan perlu perhatian khusus masyarakat apabila close data policy masih saja diterapkan KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Dalam waktu yang ada ini masih ada beberapa hal yang perlu diketahui publik, misal soal kampanye dan dana kampanye, soal pungut hitung dan rekam suara serta hasilnya. Saya sulit membayangkan kalau ketertutupannya terjadi pada data-data terkait pungut hitung,” urai dia.

Oleh karena itu, Kaka sangat menyayangkan apabila kebijakan KPU terus bersifat tertutup dan tidak bisa diubah menjadi lebih terbuka kepada publik. Karena dia memandang, hal itu malah akan membahayakan citra kelembagaan penyelenggara Pemilu itu sendiri maupun sistem demokrasi di Indonesia.

“Itu kalau tidak dilakukan perbaikan, maka ini bagian dari penurunan kualitas demokrasi. Dan sayangnya, penurunan kualitas demokrasi terjadi di lembaga penyelenggara Pemilu. Harusnya lembaga ini kan anak kandung dari reformasi, yang di dalamnya penghormatan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sekaligus sebagai bagian dari endorsement terhadap demokrasi,” ungkapnya.

“Harusnya KPU menjadi yang terdepan untuk menjaga demokrasi dan mengendorse demokrasi. Tentu dengan koridor hukum ya. Sepanjang hukum memberikan ruang kepada KPU, ya lakukan.

Karena soal open data policy itu sudah menjadi standar Pemilu demokratis internasional, salah satunya ada transparansi dan akuntabilitas. Dan itu pun belum dihapus dari UU 7/2017 kan. Artinya memang itu masih kewajiban KPU. Kecuali pembuat undang-undang menghapus atau melakukan koreksi,” tutup Kaka.

•RDO





“Jika benar harus tanggung risiko, tapi jika tidak harus dipulihkan nama baiknya. Isu ini jangan dipolitisasi, dimanfaatkan demi kepentingan orang-orang tertentu”

Ade Indra Chaniago



# ISU SELINGKUH MULAI LAGI DI SUMSEL

**Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kembali mencuat isu perselingkuhan kepala daerah, terbaru Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi Mahmud diduga terlibat skandal dengan seorang perempuan.**

Bahkan ratusan orang anggota dari Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK) menggelar demonstrasi di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlokasi di Jakarta Pusat, menuntut pencopotan Apriyadi dari jabatannya.

Koordinator Aksi dari PPK, Dendi Budiman, mengungkapkan bahwa Apriyadi diduga terlibat dalam sebuah skandal perselingkuhan dengan seorang perempuan. Dendi menyatakan bahwa ada bukti terkait perselingkuhan tersebut.

“Bukti-bukti tersebut sudah kami sampaikan dan diterima oleh seorang staf di Kemendagri,” ungkap Dendi.

Dendi menilai bahwa Apriyadi tidak pantas lagi untuk memegang jabatan sebagai Pj Bupati Muba.

Masyarakat Muba, menurutnya, telah merasa jenuh dengan perilaku Apriyadi yang dianggap tidak mencerminkan etika dan moral seorang pemimpin.

Dalam pandangan Dendi, seorang pemimpin seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, bukan sebaliknya.

“Kami meminta agar Mendagri segera mencopot Apriyadi dari jabatannya karena tindakan yang dilakukan sangat memalukan. Ada video yang memperlihatkan Apriyadi bersama seorang wanita yang bukan istrinya tidur di ranjang dan adegan tersebut direkam oleh sang perem-

puan. Dalam video tersebut, Apriyadi terlihat tidak mengenakan pakaian dan hanya tertutup selimut berwarna putih. Di situ juga terlihat ada seorang perempuan yang kami yakini bukan istrinya,” jelasnya.

Dendi juga menyebut bahwa mereka sebelumnya telah mencoba untuk mengklarifikasi masalah ini langsung dengan Apriyadi melalui surat resmi. Namun, upaya tersebut hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.

“Sebelum kami datang ke Kemendagri, kami telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada yang bersangkutan, tetapi sampai sekarang, permintaan kami belum dijawab,” tambahnya.

Akademisi dan pengamat politik, Ade Indra Chaniago mengungkapkan keprihatinannya terhadap isu perselingkuhan yang menimpah kepala Pj Bupati Muba Apriyadi. Sangat disayangkan isu tersebut tidak muncul sejak lama melainkan mencuat jelang tahun politik.

“Kita ingin saat bicara kompetisi, bicara program yang sifatnya untuk kepentingan orang banyak bukan hal-hal seperti ini justru muncul untuk menjatuhkan,” katanya, Jumat, 29 September 2023.

Pasalnya, kata Ade Indra, semua orang memiliki masa lalu terlepas itu hal yang pahit ataupun manis. Demokrasi seharusnya bertarung tentang program, visi, misi, bukan bertarung hal-hal negatif.

“Ayo kita didik masyarakat kita untuk bicara program, potensi apa yang kita punya, apa yang kita harapkan bersama, bukan menampilkan hal negatif,” tambahnya.

Isu yang justru mencuat ini sangat tidak mendidik. Jika memang ingin mencari sisi negatif bisa dicari tahu kelamahan yang membuat Pj Bupati Muba ini gagal.

Pasalnya, ini untuk kemaslahatan orang banyak, sedangkan isu ini adalah wilayah pribadi yang membuat masyarakat tidak cerdas, disuguhi dengan hal-hal negatif secara terus menerus.

Kemendagri juga tidak bisa langsung mencopot jabatan sebelum melakukan konfirmasi dari yang bersangkutan serta biarkan saja proses berjalan.

“Kemendagri yang menindaklanjuti dan semua ada aturannya, jika benar harus tanggung risiko, tapi jika tidak harus dipulihkan nama baiknya. Isu ini jangan dipolitisasi, dimanfaatkan isu ini demi kepentingan orang-orang tertentu,” pungkasnya.

Tidak hanya Pj Bupati Muba, Apriyadi, isu perselingkuhan juga menimpah mantan Plt Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah. Sebuah foto yang menunjukkan momen mesra antara Kaffah dan seorang ASN wanita cantik dengan inisial MAW beredar

luas di media sosial.

Dalam gambar yang beredar tersebut, terlihat seorang pria yang diduga Kaffah tengah berduaan dengan wanita tersebut dalam sebuah mobil. Dampak dari tersebut foto mesra ini adalah pemberhentian MAW dari jabatannya.

MAW sendiri adalah Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah di Bappeda Litbang Kota Palembang.

Kepala Bappeda Litbang Palembang, Harrey Hadi, telah mengonfirmasi bahwa MAW telah diberhentikan dari jabatannya.

“Benar, yang bersangkutan sudah diberhentikan,” katanya belum lama ini.

Harrey juga menekankan bahwa saat ini ia belum dapat memastikan apakah wanita dalam foto mesra tersebut adalah MAW dan ia enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai masalah pribadi.

Hal serupa juga pernah terjadi pada beberapa pemimpin daerah seperti Alex Noerdin, Herman Deru hingga Eddy Santana Putra, meskipun isu yang menimpah tidak selalu terkait perselingkuhan.

Alex Noerdin disebut selingkuh dengan istri Azwirdhi Aminudin, Andria Sisca, video menampilkan bukti keberangkatan Alex dan Andria ke Singapura.

Dahulu, video itu sempat diproses kepolisian. Alex melaporkan Azwirdhi dan pihak-pihak yang menyebarkan video itu atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

Isu serupa juga menimpah Herman Deru saat masih menjadi Bupati Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). Dia dilaporkan oleh mantan pembantunya ke Mapolda Sumsel atas laporan kasus asusila yang diduga terjadi pada 2003.

Deru dituding menghamili pembantunya Anisa Piatul binti Hamdani dan sudah melahirkan seorang anak, Anisa mengaku pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga Herman Deru pada tahun 2004 lalu.

Sedangkan kasus perceraian mantan Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra dengan istri pertamanya, Srimaya Hariyanti juga menjadi sorotan pada masanya. Srimaya diceraikan 2011 lalu.

Eddy kemudian menikahi seorang model bernama Eva Ajeng, istri kedua inilah yang sering tampil di publik. ● IRY







“Sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak ikut dalam Pilgub Kalteng 2024”

Nadalsyah

# INFO PILKADA

Minggu I • Oktober 2023

9

## CAGUB KALTENG MULAI MENDEKLARASIKAN DIRI

**Beberapa nama mulai bermunculan dan mendeklarasikan diri maju dalam pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Tengah (Kalteng) 2024, seperti Ir H Abdul Razak, Nadalsyah hingga Supian Hadi.**

Kalteng memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA), keanekaragaman hayati, beragam budaya, suku bangsa, dan agama. Untuk menghadapi tantangan pembangunan masa depan yang semakin meningkat, diperlukan sosok pemimpin yang memiliki visi dan kemampuan untuk mengambil kebijakan yang tepat.

Ir. H. Abdul Razak dinilai oleh berbagai kalangan sebagai pemimpin yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Kalteng dalam lima tahun ke depan.

Saat ini, Abdul Razak terus mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan berbagai kalangan lainnya untuk maju sebagai calon Gubernur Kalteng periode 2024-2029.

Dukungan tersebut datang dari berbagai kelompok dan organisasi, seperti Angkatan Penerus Perjuangan Gerakan Mandau Talawang Pancasila (APP GMTPS), Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Tengah, anggota legislatif di DPRD Kalimantan Tengah dari berbagai partai politik, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kalimantan Tengah.

Persatuan Pensiunan Kehutanan (Pershutindo) Kalimantan Tengah, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Kalimantan Tengah, Hidayatullah Kalimantan Tengah, Buddhayana Indonesia Palangka Raya, dan sejumlah kelompok gereja di Palangka Raya.

Selain itu, dukungan juga datang dari kaum milenial Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Milenial For Abdul Razak (MFAR) dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Kalimantan Tengah.

Ketua DPP Paguyuban Keluarga Besar Flo-bamora Provin-

si Kalteng periode 2023-2028 Gregorius Doni Senun menilai, sosok Abdul Razak layak untuk menjadi Gubernur Kalteng.

“Sosok Abdul Razak yang merupakan tokoh masyarakat dan saat ini Wakil Ketua DPRD Kalteng tiga periode, layak menjadi Gubernur Kalteng,” ucapnya.

Ketua Dewan Penasehat atau Pembina DPD Partai Golkar Kalimantan Tengah Ir. H. Abdul Razak menyatakan siap maju sebagai calon Gubernur Kalteng pada pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

“Kesiapan saya untuk maju dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2024 mendatang berdasarkan arahan dan petunjuk Ketua DPD Partai Golkar Kalteng HM. Ruslan AS,” ungkap Abdul Razak.

Abdul Razak memohon dukungan semua pihak, terutama warga dari Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) yang di wilayah Kalimantan Tengah jumlahnya diklaim sebanyak 30 persen dari penduduk Kalteng.

“Apapun keputusan partai, maka saya harus siap melaksanakan amanah untuk maju dalam Pemilihan Calon Gubernur Kalimantan Tengah pada Pemilu serentak tahun 2024 mendatang,” tegas Abdul Razak.

Sedangkan kandidat calon Gubernur yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng, Nadalsyah, merasa optimis untuk bersaing dalam Pilgub yang dijadwalkan pada tahun 2024 mendatang.

“Sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak ikut dalam Pilgub 2024,” katanya.

Sebagai langkah awal, Nadalsyah berencana untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI sebelum kemudian mengambil langkah serius dalam Pilgub.

“Saya memohon doa restu dari masyarakat Kalimantan Tengah,” tambahnya.

Nadalsyah mengakui bahwa selama ini belum ada komunikasi politik secara formal terkait Pilgub 2024. Namun, ia mengindikasikan bahwa telah terjadi komunikasi informal yang bersifat membangun dukungan.

“Mantap, Insyaallah mantap dalam Pilgub 2024,” tambahnya.

Sementara mantan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H Supian Hadi akhirnya menyatakan kesiapannya mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalteng pada Pilgub 2024.

“Saya siap maju untuk menjadi kandidat calon Gubernur Kalteng. Secara mental dan semua saya siap untuk maju dalam Pilgub Kalteng 2024,” tegasnya, belum lama ini.

Supian Hadi yang merupakan kader PDIP

itu memohon dukungan masyarakat Kalteng untuk mencalonkan dirinya sebagai Gubernur Kalteng. Meski diketahui dari partai mocong putih itu juga ramai digadangkan Agustiar Sabran maju dalam Pilgub nanti.

“Semua dari partai ada beberapa, mungkin PDI ada beberapa yang ingin, di Golkar juga ada beberapa. Tapi partai akan melihat dan memilih serta menentukan,” ungkapnya.

Ketua DPC PDIP Kotim, Halikinnor, menganggap wajar keinginan mantan Bupati Kotim, Supian Hadi, untuk maju dalam Pilgub Kalteng 2024 mendatang.

Halikinnor mengatakan bahwa semua individu memiliki hak untuk bersaing dalam pemilihan umum, termasuk Pilgub, Pilkada, dan lainnya. Ia juga menegaskan bahwa Supian Hadi, yang merupakan kader PDIP, memiliki kapasitas dan potensi untuk maju sebagai calon gubernur.

“Siapa pun berhak, apalagi Supian Hadi kan Kader PDIP, jadi wajar saja. Beliau sudah dua kali menjabat sebagai Bupati, tentunya memiliki kapasitas dan potensi untuk maju sebagai gubernur,” ujar Halikinnor.

Meskipun demikian, Halikinnor mengungkapkan bahwa hingga saat ini, PDIP belum memberikan instruksi resmi terkait Pilgub, termasuk calon kader yang akan diusung oleh partai dalam pemilihan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, para kader partai sekarang lebih difokuskan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Para kader PDIP diarahkan untuk turun ke masyarakat guna melakukan sosialisasi terkait calon presiden yang sudah ditetapkan oleh partai, meskipun belum resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jadi, siapa pun kader PDIP, terutama yang memiliki potensi, bisa saja dan berhak untuk maju. Keputusan akhir akan ditentukan oleh partai pada waktunya,” pungkas Halikinnor.

• IRY





“Ada tiga sampai empat program yang harus dikerjakan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan ketenagakerjaan”

*Fredrik Benu*



# WACANA PERUBAHAN DAN PERBAIKAN UNTUK NTT

**Suhu politik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Timur (NTT) 2024 terus memanas. Banyak calon kandidat yang telah muncul dan menyatakan kesiapannya untuk memimpin NTT.**

**H**al ini menggambarkan betapa dinamisnya politik di daerah tersebut, dengan jargon politik “jualan” para bakal calon Gubernur NTT yang telah mereka susun.

Para calon ini membawa beragam wacana perbaikan dan perubahan di berbagai sektor, termasuk pertanian, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, pengangguran, ketenagakerjaan, hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai janji-janji jika terpilih nanti.

Guru Besar Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Prof. Ir. Fredrik Benu, MSi, PhD mengungkapkan gagasan para Bakal Calon Gubernur NTT adalah langkah yang sah, tergantung dari sudut pandang masing-masing.

Menurutnya ada tiga aspek penting di NTT, yaitu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Bergantung pada prioritas masing-masing calon, fokus pada peningkatan mutu pendidikan, seperti yang diusul-

kan oleh Fransiscus Go, adalah langkah yang baik, dan ia menghormatinya.

Namun, ia juga menekankan bahwa masalah ekonomi dan kesehatan masyarakat NTT tidak boleh diabaikan dan harus diatasi bersama-sama.

“Ada tiga sampai empat program yang harus dikerjakan, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan ketenagakerjaan,” ujar Prof. Fred Benu.

Dia juga mengingatkan bahwa efek dari program strategis dapat berlangsung dalam jangka panjang maupun pendek. Oleh karena itu, ia mengajak Frans Go untuk mempertimbangkan “untung-ruginya” secara politik jika pendidikan menjadi prioritasnya saat menjabat nanti.

Ia mengingatkan bahwa jabatan seorang gubernur hanya berlangsung selama lima tahun, dan pemimpin harus mengevaluasi program kerjanya di akhir masa jabatan.

Sebagai seorang akademisi, Prof. Fred Benu bersedia mendukung calon pemimpin NTT yang fokus pada pendidikan, tetapi ia menegaskan bahwa aspek lain seperti ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan ketenagakerjaan juga harus diperhatikan.

Pendapat serupa juga datang dari Dr. Anthonius Bele, seorang dosen dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Ia mengapresiasi jika pendidikan menjadi prioritas bagi calon pemimpin NTT, namun juga meng-

ingat kan pentingnya memperhatikan sektor lain seperti ekonomi

dan kesejahteraan masyarakat.

“Namun, mereka juga menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus diiringi dengan upaya dalam sektor-sektor lainnya agar NTT dapat mencapai perkembangan yang lebih baik,” tambahnya.

Diketahui sejumlah nama-nama potensial telah muncul dan menjadi perbincangan di kalangan sebagai calon Gubernur NTT.

Seperti Yohanis Fransiskus Lema yang merupakan seorang politisi muda asal NTT. Awal kariernya sebagai dosen di Universitas Nasional memperkuat kualifikasinya sebagai seorang akademisi.

Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan telah berperan sebagai konsultan di beberapa perusahaan multinasional di berbagai negara, termasuk Jakarta, Malaysia, Singapura, Amerika, dan Afrika. Kombinasi usia muda dan kekayaan pribadinya membuatnya menarik perhatian.

Nama lain yang ikut mencuat adalah Melki Laka Lena yang sudah dikenal luas di NTT. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT dan pernah terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI setelah Pileg 2019 dari Dapil NTT 2.

Selanjutnya ada, Juli Sutrisno Laiskodat istri dari mantan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Julie Laiskodat telah menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Gubernur NTT, menggantikan suaminya yang tidak

mencalonkan diri lagi di Pilgub NTT 2024.

Frans Aba yang lebih dikenal dengan nama Frans Aba, juga merupakan salah satu figur yang ramai dibicarakan oleh netizen. Ia meraih gelar *Philosophi of Doctoral* dari University Sains Malaysia.

Selain itu juga ada, Orias Petrus Moedak. Ia secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon Gubernur NTT. Orias Petrus Moedak memiliki karier yang cemerlang, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ada juga Iskandar Laka yang pernah menjabat sebagai Staf Ahli DPRD Pasuruan dan terlibat dalam berbagai peran penting di media massa nasional. Ia juga merupakan pendiri dari Law Firm “IL” & Associates serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Fajar Panca Yudha.”

Julie Laiskodat, sedang diperbincangkan sebagai salah satu calon potensial dalam pilgub NTT tahun 2024.

Julie, ketika dimintai komentar mengenai isu ini, belum memberikan pernyataan tegas mengenai kesiapannya untuk maju dalam Pilgub NTT 2024.

“Sejauh ini memang belum ada pembahasan dengan suami saya, Viktor Laiskodat. Tetapi selama suami saya dan ketua umum saya, Surya Paloh, memberikan izin, saya pasti akan siap. Toh, masih ada waktu yang cukup lama, kita tunggu tanggal mainnya saja,” ucap Julie belum lama ini.

Julie juga menyebut bahwa partai NasDem masih dalam tahap mencari kader terbaik untuk melanjutkan kerja yang telah dilakukan oleh mantan suaminya, Viktor Laiskodat, selama lima tahun terakhir.

“Meskipun saya memiliki niat untuk maju, jika hasil survei menunjukkan dukungan yang minim, maka keputusan akhir akan dilakukan oleh partai setelah melakukan survei yang lebih mendalam. Yang pasti, izin dari suami saya, Viktor Laiskodat, merupakan syarat mutlak,” tambahnya. • IRY







“Gagasan apa yang dibawa untuk perubahan Kota Palembang itu yang dinantikan oleh masyarakat”

Fatkurohman

# TEROBOSAN CALON WALI KOTA PALEMBANG DINANTI MASYARAKAT

**Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) merilis hasil untuk pemilihan wali kota dan masa depan Kota Palembang jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, berdasarkan data tersebut tingkat akseptabilitas calon Wali Kota Palembang kini mencuatkan tiga nama yang dinilai layak menjadi orang nomor satu di kota dengan icon Jembatan Ampera ini.**

**K**etiga nama berdasarkan temuan survei tersebut adalah Fitrianti Agustinda dengan jumlah 24,5 persen, disusul dengan Ratu Dewa dengan tingkat 24,0 persen dan pada posisi ketiga ada Charma Afrianto dengan jumlah 14,5 persen.

Sedangkan untuk tingkat elektabilitas calon Wali Kota Palembang, berdasarkan temuan survei simulasi Top of Mind tanpa sebut nama posisi teratas masih ditempati oleh Fitrianti Agustinda dengan jumlah 18,5 persen.

“Ratu Dewa dengan jumlah 17,0 persen dan posisi ketiga ada Charma Afrianto dengan jumlah 9,5 persen disusul Basarudin dengan jumlah 2,5 persen dan Nasrun Umar dengan jumlah 1,0 persen,” tulis hasil LSIN tersebut.

Melalui berbagai simulasi nama Charma Afrianto memiliki modal yang sangat menjanjikan untuk kontestasi Pilkada dengan modal akseptabilitas 14,5% dan elektabilitas 9,5%.

Selisih antara Charma Afrianto dengan kandidat kuat incumbent Fitrianti Agustinda sekitar 9% begitu juga dengan

Ratu Dewa hanya berselisih tidak jauh berbeda.

Jika kontestasi terjadi dengan banyak kandidat yang maju atau tidak head to head maka dapat semakin memuluskan kemenangan Charma Afrianto dengan didukung kerja-kerja politik konkrit terus meningkatkan elektabilitas setidaknya menembus angka 35% jelang satu bulan hari H pencoblosan.

Berdasarkan temuan data statistik, Charma Afrianto mendapatkan persepsi baik atau layak sebagai Wali Kota Palembang 2024-2029 dengan nilai interval 3,87 atau nilai interval konversi 77,37.

Berdasarkan temuan data statistik uji ahli, Fitrianti Agustinda mendapatkan nilai interval rata-rata 3,72 atau dengan persepsi layak atau baik dengan nilai konversi 74,4.

Berdasarkan temuan data statistik uji ahli, Ratu Dewa mendapatkan persepsi baik atau layak sebagai pemimpin Kota Palembang 2024-2029 dengan nilai interval 3,9 atau nilai interval konversi 78,14.

Berdasarkan temuan data statistik uji ahli, Charma Afrianto mendapatkan persepsi baik atau layak sebagai pemimpin Walikota Palembang 2024-2029 dengan nilai interval 3,87 atau nilai interval konversi 77,37.

Nilai yang diperoleh Charma skornya melebihi Fitrianti Agustinda dengan selisih 3 poin. Charma dinilai unggul dalam visi dan gagasan serta intelektualitasnya. Kemudian para ahli memberikan skor rendah pada sosok Charma Afrianto berkaitan dengan kemampuan

dalam memenuhi janji saat memimpin.

Dikatakan Fatkurohman, Koordinator Wilayah Sumsel Public Intitute (Putin) bahwa hingga saat ini semua kandidat yang digadang-gadang bakal mencalonkan diri di Pemilihan Wali Kota Palembang memiliki peluang yang sama. Mengingat incumbent tak lagi menjabat dan tidak akan mencalonkan diri.

“Semua kandidat memiliki peluang yang sama, apalagi waktunya masih cukup panjang dan masih banyak yang bisa dilakukan untuk menarik suara,” katanya saat menjadi bintang tamu dalam Podcast Info Indonesia TV, belum lama ini.

Hingga saat ini, lanjut dia, berdasarkan pemetaan wilayah Dapil 1 dan Dapil 2 masyarakat masih menginginkan pemimpin yang birokrasi ketimbang berdasarkan Partai Politik (Parpol).

“Kita melihat pemetaan masyarakat Dapil 1 dan Dapil 2 keinginan masyarakat dari pemimpin dari birokrat sebanyak 35 persen sedangkan dari Parpol 30 persen,” ulasnya.

Dia mencontohkan, masyarakat masih mendambakan masa kepemimpinan Eddy Santana Putra (ESP). Artinya kedepan masyarakat Kota Palembang ingin dipimpin oleh orang-orang yang memiliki keberanian mengambil kebijakan.

Dari masa kepemimpinan ESP sendiri masyarakat merasakan banyaknya perubahan, mulai dari penataan 16 Ilir, penyaluran air bersih atau PDAM hingga banyak event

pariwisata.

“Apa yang ditinggalkan oleh pemimpin sejak 10 tahun terakhir hanya standar saja tidak ada kejutan, yang paling diingat adalah Sekanak Lambidaro selebihnya belum ada,” tegasnya.

Dengan harapan masyarakat yang menginginkan adanya lompatan dan terobosan dari pemimpin Kota Palembang membuat semua kandidat memiliki peluang termasuk Ratu Dewa yang baru saja dilantik sebagai Pj Wali Kota Palembang.

“Gagasan apa yang dibawa untuk perubahan Kota Palembang itu yang dinantikan oleh masyarakat,” katanya.

Sementara calon Wali Kota Palembang, Charma Afrianto mengaku belum puas dengan hasil survei tersebut karena popularitas yang diraihinya masih sekitar 25 persen, padahal ekspektasinya bisa lebih dari itu.

“Bagi saya itu biasa saja karena ekspektasi saya popularitas bisa lebih dari situ,” katanya.

Charma menegaskan bahwa dirinya harus memberikan gagasan brilian ditengah masyarakat garis bawah, yang bisa diterima sebagai sebuah program yang bisa teralisasi, tidak hanya mimpi atau janji sesuai dengan program yang telah disampaikan, sesuai kajian, sesuai dengan politik anggaran.

“Angka belum signifikan sesuai ekspektasi saya, saya akan terus berbuat, tidak mau jadi politikus dadakan, jauh sebelum pilkada saya sudah mulai bergerak. Salah satunya dengan ratusan anak putus sekolah, pasien berobat gratis, hampir 100 kursi roda, saya lakukan untuk meringankan beban pemerintah,” sambungnya.

Pasalnya, kata dia masyarakat sudah tidak percaya janji palsu, konsepnya apa yang diucapkan harus dibuktikan.

“Saat ini saya berpikir bukan sebagai calon wali kota tapi sudah menjadi wali kota, apa yang sudah saya buat, program ini sudah saya wujudkan, saya sedang mencerdaskan anak bangsa,” pungkasnya. ● IRY





“Sementara untuk soliditas koalisi, kami juga telah mendapat surat dari DPP untuk bersama-sama dengan PKS dan PKB untuk menindaklanjuti tim kemenangan dari tim pusat. Jadi target kami di Sumsel ini, Nasdem harus juara, itu harga mati,”

*Syamsul Bahri*



# NANAN DAN YASER DIPREDIKSI LOLOS KE SENAYAN

**Dua pendatang baru di pemilihan legislatif (Pileg) DPR RI dari Sumatera Selatan yakni SN Prana Putra Sohe (Nanan) dan Muhammad Yaser (Yaser) diprediksi lolos ke Senayan pada Pemilu yang akan digelar 14 Februari 2024.**

**M**antan walikota Lubuklinggau dan menantu Gubernur Sumsel H Herman Deru ini dalam tataran keterpilihan (elektabilitas) para caleg DPR RI dapil satu Sumatera Selatan berhasil menyodok di urutan papan atas.

Dua pendatang baru tersebut tentunya kedepan akan mengancam posisi incumbent DPR RI dapil satu Sumatera Selatan sehingga dipastikan akan terjadi persaingan kuat dalam satu bulan kedepan. Satu sisi dua pendatang baru akan mencoba menerobos benteng petahana dan satu sisi lain para petahana akan berusaha mengamankan tiket kursinya.

Nanan dan Yaser yang masih bermodalan keterkenalan (popularitas) berada di bawah 55 persen dan tingkat kesukaan (akseptabilitas) di atas 90 % tentunya secara statistik belum maksimal. Namun demikian, dua hal itu merupakan keuntungan bagi dua pendatang baru itu karena ruang gerak untuk meningkatkan elektabilitas sangat terbuka.

Apabila dilihat dari trend survei, tingkat popularitas dan akseptabilitas Nanan dan Yaser masih tetap berbanding lurus (linear) dengan elektabilitasnya.

“Nama SN Prana Putra Sohe (Nanan) dan Muhammad Yaser (Yaser) inilah yang cukup kuat tarikan elektabilitasnya dibandingkan nama-nama caleg pendatang baru lainnya. Elektabilitasnya sudah menyodok pada papan tataran papan atas (empat besar) dari para caleg DPR RI dapil satu Sumsel baik pada pertanyaan terbuka (top of mind) maupun semi terbuka (dengan menyodorkan seluruh nama-nama caleg DPR RI dapil satu Sumsel sesuai yang ada di Daftar Calon Sementara (DCS),” kata Direktur eksekutif LKPI, Arianto.

Elektabilitas SN Prana Putra Sohe dan Muhammad Yaser berada di atas tujuh persen. Adapun nama caleg lainnya yang berada di bawah SN Prana Putra Sohe masih harus berjuang keras untuk mendongkrak elektabilitasnya.

Dikatakan Arianto, kuatnya tarikan elektoral SN Prana Putra Sohe terlihat dari figur yang kuat selama dia memimpin Kota Lubuklinggau pada masa kepemimpinannya.

Sosok yang perhatian pada rakyat, sudah ada bukti nyata, gemar blusukan, sering melakukan pertemuan tatap muka/pertemuan umum di masyarakat, mudah ditemui dan visioner merupakan alasan mendasar memilih menjatuhkan pilihannya pada alumninya Fisip Unsri tersebut. Disamping itu adanya sumbangsih dari dukungan pemilih partai PKB yang mayoritas ke SN Prana Putra

Sohe membuat tambahan elektabilitasnya bisa menyalip nama-nama caleg incumbent DPR RI yang juga maju kembali pada pemilu legislatif kedepan.

Secara statistik, dengan elektabilitas yang kalau dikonversi dengan hitungan angka pemilih, SN Prana Putra Sohe menempati kursi ke empat (saat survey digelar).

“Temuan ini menjadi indikator bagi caleg DPR RI dapil satu Sumsel bahwa ada delapan kursi yang disediakan, namun ada satu nama yakni SN Prana Putra Sohe yang mulai merapat elektabilitasnya dan mengancam incumbent DPR RI,” terangnya.

Kalau dilihat dari urutan sentiment partai politik, elektabilitas partai PKB juga cukup baik dan berada di urutan kelima (7,5 %). Secara sentiment partai politik, peluang tujuh partai yang berpotensi loloskan calegnya yakni PDIP, Gerindra, Nasdem, Golkar, PKB, Demokrat dan PAN.

Nama-nama tersebut adalah Eddy Santana Putra, Muhammad Yaser, Fauzi H Amro, SN Prana Putra Sohe, Ishak Mekki, Riezky Aprilia, Kahar Muzakir dan Hafisz Tohir.

Ada satu nama juga pendatang baru yang juga sangat berpotensi masuk senayan, yakni Muhammad Yaser dari

partai Nasdem.

“Kemungkinan besar ada dua kursi yang akan

direbut satu partai untuk menempatkan calegnya di DPR RI tahun mendatang dan ditambah satu pendatang baru dari partai PKB,” ungkapnya.

Survei LKPI sendiri digelar Agustus akhir dan bulan September 2023. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka yang melibatkan 430 responden yang tersebar secara proporsional di kabupaten dan kota dapil satu provinsi Sumatera Selatan.

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan multistage random sampling dengan selang kepercayaan 95 % dan tingkat kesalahan (margin of error) +/-5%.

## Targetkan 5 Kursi

Sementara pada Pemilu 2024 ini, Partai Nasdem Sumsel yang dipimpin Herman Deru ditargetkan Ketua Umum Surya Paloh harus juara dengan meraih 5 kursi DPR RI. Di Pemilu 2019 lalu, Nasdem mendapat 3 kursi untuk di DPR RI.

Peluang untuk mendapat tambahan kursi bagi Partai Nasdem di Sumatera Selatan memang cukup besar. Di Dapil 1 sebelumnya hanya ada nama Fauzi Amro namun dengan masuknya Muhammad Yaser berpeluang akan menambah satu atau bahkan dua kursi lagi.

Sementara di Dapil 2, ada putri Gubernur Herman Deru yakni Samantha dan beberapa kader lainnya. Di Pemilu 2019 lalu, Dapil 2 menyumbang dua kursi ke DPR RI.

Ketua Bapilul Partai Nasdem Sumsel, Syamsul Bahri mengungkapkan, untuk DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditargetkan harus terisi di setiap daerah pemilihan (Dapil). Dimana 63 dapil dari 84 semua harus terus semua.

Untuk Pilpres, semua kader Partai Nasdem mulai dari DPRD kabupaten/kota, provinsi hingga DPR RI harus menampilkan sosok dan logo Anies Baswedan sebagai bentuk kecintaan pada calon presiden pilihan Koalisi Indonesia Perubahan.

“Sementara untuk soliditas koalisi, kami juga telah mendapat surat dari DPP untuk bersama-sama dengan PKS dan PKB untuk menindaklanjuti tim kemenangan dari.

Jadi target kami di Sumsel ini, Nasdem harus juara, itu harga mati,” tegasnya.

Untuk mencapai kemenangan tentu semua harus kerja keras. Tanpa kerja keras tidak akan berhasil.

Target selanjutnya Nasdem akan membawa perubahan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Perubahan yang dimaksudkan adalah mengembalikan, memulihkan, memaksimalkan agar Indonesia kembali ke UUD 1945. •RDR







“Kita hanya mendoakan saja secara syariat Islam, tidak ada ritual apapun atau sesajen dalam mendoakan mereka. Ada yang keinginan mereka terwujud, ada yang tidak. Kita tetap berusaha membantu dengan berdoa, keputusan akhir tergantung keridhaan Allah SWT”

Andi Munadi

# MENGENAL TRADISI GAIB CALEG JELANG PEMILU

**Banyak cara dilakukan para kandidat di Pemilihan Umum (Pemilu) untuk meraih kemenangan. Mulai dari menarik perhatian massa, melakukan promosi dengan berbagai cara hingga melakukan pendekatan secara persuasif ke calon pendukungnya.**

Namun tak dapat dielakkan, tradisi meminta doa-doa dan ritual yang dilakukan di makam-makam keramat masih dilakukan oleh para calon legislatif (caleg), calon kepala daerah (cakada) hingga calon presiden (capres).

Ustad Andi Munadi (49) menjadi salah satu pemuka agama di Kota Palembang Sumatera Selatan (Sumsel), yang sering dikunjungi oleh para caleg dan cakada di Sumsel. Bahkan jelang-jelang pencoblosan, dia kerap didatangi para caleg atau tim sukses (timses) cakada.

Kedatangan mereka untuk minta didoakan agar hajatnya terkabul, yakni menjadi pemenang di kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumsel.

Selain itu, mereka juga meminta didoakan agar dijauhkan dari musibah selama mereka menjabat. Lalu, ada juga politisi yang minta didoakan agar jabatannya tetap dilanggengkan tanpa ada hambatan atau gangguan.

“Kita hanya mendoakan saja secara syariat Islam, tidak ada ritual apapun atau sesajen dalam mendoakan mereka. Ada yang keinginan mereka terwujud, ada yang tidak. Kita tetap berusaha membantu dengan berdoa, keputusan akhir tergantung keridhaan Allah SWT,” ucapnya.

Namun tak sembarang orang bisa mendapatkan bantuan dari Ustad Andi Munadi. Dia memilih-milih orang tertentu yang dirasanya mampu membawa kebaikan saat diamanahkan mendapatkan jabatan.

Ada beberapa hal yang dilakukan agar keinginan dari caleg dan cakada bisa terwujud. Seperti menggelar yasinan bersama, bersedekah ke anak yatim dan membagi-bagikan daging kambing/sapi

ke masyarakat tidak mampu atau majelis.

Seperti meminta doa dijauhkan dari bala bencana, orang tersebut harus menyedekahkan daging ayam atau kambing siap makan ke anak yatim dan majelis. Dengan syarat, orang tersebut tidak boleh ikut memakannya.

Selama berkonsultasi dan meminta doa keselamatan dan hajatnya, Ustad Andi Munadi tidak pernah mematok harga tertentu. Hanya seikhlasnya saja sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan orang yang akan memberinya.

“Kalau meminta tolong ke dukun kan, ada tarif khusus dan ritual tertentu. Kalau kita tetap pada syariat Islam, tidak macam-macam dan tidak bisa kita pastikan keinginan mereka terwujud. Semua itu kembali ke ketetapan Allah SWT,” katanya.

Ustad Andi Munadi sejak tahun 1998 sudah mulai membantu untuk mendoakan orang-orang yang membutuhkan bantuan spiritual.

Tak hanya

meminta doa ke alim ulama, para caleg dari berbagai daerah di Sumsel, turut mendatangi makam keramat di Wisata Bukit Siguntang Palembang Sumsel. Ada dua makam yang kerap dikunjungi, yakni makam Raja Segentar Alam dan Putri Kembang Dadar.

Ada 7 unit makam di Wisata Bukit Siguntang Palembang, yang merupakan keturunan dari raja-raja di masa Kerajaan Sriwijaya. Apalagi Bukit Siguntang dipercaya sebagai salah satu petilasan di masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya.

Rosita (42), salah satu juru kunci Wisata Bukit Siguntang mengatakan, biasanya tiap bulan Desember jelang Pemilu, banyak caleg-caleg yang datang ke makam-makam di Bukit Siguntang Palembang.

Mereka datang untuk berziarah dan mengirimkan doa kepada para leluhur, yang dipercaya sakti mandraguna di masanya. Ada yang berasal dari Palembang, Prabumulih, Ogan Ilir, Baturaja, Muara Enim dan daerah-daerah lainnya.

Bahkan banyak juga pengunjung dari daerah lain, seperti Bengkulu, Jakarta hingga beberapa negara Asia, di antaranya Malaysia, Singapura dan lainnya.

“Kita hanya menyediakan kembang dan air untuk ditaburkan di atas makam para raja dan putri dari Kerajaan Sriwijaya. Jika ingin didoakan, kita bantu juga. Tapi keinginan mereka itu terkabul jika diijabah Allah SWT. Kita selalu mengingatkan agar tidak meminta hal-hal aneh ke makam, karena itu tak sesuai syariat Islam,” ungkapnya.

Ada juga tradisi yang hingga kini masih dilakukan para pengunjung untuk mewujudkan keinginan-nya. Seperti mengukir pan-

jang kedua tangannya yang dibentangkan di sebilah bambu dan dipasang tanda menggunakan karet.

“Kalau yang ingin mendapatkan jabatan tertentu, pasti berziarah ke makam Raja Segentar Alam. Tapi kalau niatnya untuk berdoa agar bisnisnya lancar, biasanya berziarah ke makam Putri Kembang Dadar,” katanya.

Namun tak jarang juga para caleg datang di malam hari ke Bukit Siguntang, untuk berdoa langsung ke makam-makam keramat tersebut. Bahkan ada juga pengunjung yang membawa serta orang pintar, dengan menggelar berbagai ritual-ritual aneh.

Rosita sering mendapati makam Raja Segentar Alam penuh dengan kotoran. Seperti disirami air kopi, beras dan dedaunan yang berserakan di lantai makam.

Apalagi di malam Jumat Kliwon, akan banyak pengunjung yang datang melakukan ritual-ritual yang tak sesuai syariat Islam.

“Kita tidak bisa memantaunya karena datangnya di malam hari. Mungkin karena tak mau orang lain tahu ritual mereka. Tapi ritual mereka itu benar-benar mengotori makam,” ucapnya.

Tapi jika ada yang datang dengan keinginan tertentu dan hajatnya terwujud, biasanya mereka akan menyumbangkan apapun sesuai dengan janjinya. Seperti menyumbangkan karpet untuk diletakkan di makam, ayam dan kambing yang diserahkan ke juru kunci untuk dirawat.

Namun Kiki Wita Suryanti (31), Caleg Partai Perindo Sumsel tidak tertarik sama sekali untuk melakukan ritual apapun, demi meraih kemenangan. Karena baginya, menjadi seorang politisi adalah panggilan jiwa.

Caleg nomor urut 2 Dapil VI Kabupaten Banyuasin Sumsel ini berujar, jika menjadi caleg adalah perjuangan ideologi, bukan sekedar coba-coba keberuntungan, harus berani maju berjuang untuk duduk di parlemen walaupun harus melalui proses yang panjang.

“Saya adalah kader partai dan tergerak untuk masuk ke parlemen. Masyarakat harus tahu bahwa ini perjuangan, mewakili masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak di parlemen.

Terlepas dipilih atau tidaknya, kita menyerahkan semua kepada Takdir. Kita tahu bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil,” ungkapnya.

Dia menilai orang-orang yang datang ke paranormal atau mengunjungi makam-makam keramat untuk minta dimenangkan adalah perbuatan yang berlebihan. Berdasarkan ajaran agama Islam, untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT, sangatlah mudah dan tidak perlu berbuat yang menyimpang dari ajaran agama.

Dia lebih memilih untuk berziarah ke makam orangtua, makam keluarga atau makam para kyai tanpa ada niat lain.

•RDR





“Saya melihat kekompakan dalam kekeluargaan, membangun kebersamaan dan berbangsa ini luar biasa. Maka saya sebagai Gubernur sangat mengapresiasi ini, mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga”

*Herman Deru*



# MEMPERTAHANKAN ZERO KONFLIK DI PEMILU 2024

**Meski ada letupan-letupan kecil namun secara umum Indonesia sebagai negara dengan beragam suku bangsa dan budaya mampu meredam riak-riak perpecahan. Membaurnya banyak suku mampu meredam terjadinya gesekan-gesekan konflik yang mulai kembali muncul menjelang Pemilu 2024.**

**D**i Sumatera Selatan, gesekan-gesekan konflik antar suku dan golongan bisa dikatakan sangat kecil sehingga provinsi ini dikenal sebagai wilayah Zero Konflik sejak lama. Bahkan Provinsi Sumsel termasuk daerah paling aman dari konflik rasial yang mulai marak terjadi di berbagai daerah.

Kepastian itu ada setelah seluruh komunitas suku dan golongan bersepakat untuk sama-sama mempertahankan status zero konflik.

Paguyuban Jawa Sumatera (Pujasuma) Sumsel memastikan konflik sosial akan minim terjadi karena semua sadar hal itu malah menimbulkan kerugian. Sehingga meski mereka mencapai sekitar 45 persen penduduk di Sumsel namun dalam berpolitik kesukuan itu bukan menjadi hal utama.

“Anggota Pujasuma Sumsel itu semuanya non politik jadi tidak akan ada juga isu-isu suku atau rasis pastinya. Bagi kami di Sumsel yakni mewujudkan kerukunan. Sedangkan untuk politik itu masalah individu dan hak asasi anggota tetapi bukan urusan Paguyuban,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PUJASUMA Sumsel Untung Wijaya.

Dia memberikan garansi pada Pemilu 2024 di Sumsel tidak akan ada isu politik alias zero konflik dan soal kesukuan ini tidak akan ditarik-tarik ke panggung politik. Kendati hal itu bisa saja terjadi namun di Sumsel disebutkan tidak akan.

“Sumsel sebagai contoh zero konflik untuk suku dan budaya. Dimana semua masyarakatnya sudah dewasa dan mulai pintar sehingga tidak akan terpengaruh dengan iming-iming apapun. Intinya politik di Sumsel tidak

membawa nama suku,” paparnya.

Untung Wijaya yang juga menjabat sebagai Ketua Pujasuma Kota Palembang memberikan himbauan kepada semua warga Jawa di Sumsel dan Palembang untuk menciptakan suasana aman dan nyaman di Pemilu 2024 mendatang.

“Mari kita ciptakan suasana tentram dan damai. Politik hak kita masing masing dan mari kita jaga ketertiban. Tidak hanya warga Jawa saja tapi juga kepada seluruh warga di Pulau Sumatera ini,” tuturnya.

Diakuinya dia sendiri sudah menilai kota Palembang sebagai kampung halamannya. Sejak tahun 1983 tinggal di Palembang dan bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel serta pensiun di tahun 2021.

Tekad yang sama disampaikan Sultan Palembang Darussalam, Iskandar Mahmud Badaruddin. Dia juga menyebutkan selama ini di Sumsel dan Palembang tidak pernah terjadi konflik kesukuan.

“Di Sumatera Selatan tidak pernah ada isu suku di dunia politik belum pernah terjadi dan tetap zero konflik,” jelasnya.

Diakuinya dia merasa wajib untuk turun tangan meredamnya. Bagaimana pun sebagai Sultan Palembang Darussalam dia menjadi mitra Pemerintah untuk menjamin hal itu.

“Tentunya saya sebagai mitra pemerintah ikut turun biar politik nanti berjalan aman,” jelasnya.

Dia mengimbau kepada semua warga Sumsel dan Palembang untuk

tidak percaya dengan berita hoax untuk memecah belah.

Menurutnya itu kemungkinan bisa saja terjadi dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sehingga kedepannya harus tetap diantisipasi.

“Saya imbau tetap gunakan hati nurani jangan percaya kepada berita bohong berita hoax jangan sampai terkecoh. Karena berita itu efeknya bisa mengadu domba dan bisa terkena dampaknya. Tetapi kita orang Sumatera Selatan adalah dikenal santun dan rama paling tegang rasa soal suku ras dan agama. Tetap jaga Sumsel zero konflik di setiap pemilu kapanpun,” pungkasnya.

Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel Edward Candra menyatakan, mereka sudah menjalankan kegiatan dialog tokoh adat dan budaya dalam mewujudkan Sumsel zero konflik Pemilu 2024.

Menurutnya Sumsel hanya harus menjaga ritmenya saja karena sejak dahulu sudah dikenal sebagai provinsi di Indonesia berstatus zero konflik. Hal itu jelas disinyalir tidak akan mudah adanya isu-isu rasis bisa menyerang penduduk Sumsel di Pemilu 2024 nanti.

“Nah ini sudah menjadi modal kita, tentunya penting menjaga kondusifitas agar aman dan Pemilu berjalan jujur serta adil,” jelasnya.

Dia menyebutkan dari pertemuan sudah didapatkan beragam rekomendasi untuk tetap mewu-

judkan zero konflik di Pemilu 2024 mendatang.

“Kami telah dapat hasil rekomendasi dari para tokoh adat untuk bagi pemerintah. Tentunya akan kita lanjutkan untuk semua unsur untuk dapat ikut mempertahankan Sumsel zero konflik di Pemilu 2024 nanti,” pungkasnya.

## Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Selain suku, konflik antar agama juga jadi perhatian penting. Di Sumatera Selatan sendiri konflik-konflik itu terjadi karena adanya sikap saling menghormati antar umat beragama.

“Saya melihat kekompakan dalam kekeluargaan, membangun kebersamaan dan berbangsa ini luar biasa. Maka saya sebagai Gubernur sangat mengapresiasi ini, mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga,” ungkap Gubernur Herman Deru.

Sebagai seorang pemimpin daerah atau umaro Herman Deru menegaskan, kunjungannya ke sejumlah rumah ibadah umat beragama tidak lain untuk menjaga kekompakan dan silaturahmi guna menjaga toleransi antar umat beragama. Hal tersebut dilakukan dalam upaya mempertahankan zero konflik di Sumsel menjelang Pemilu 2024.

“Selaku gubernur, saya usahakan datang setiap ada undangan acara keagamaan. Jadi kita sepakati dulu mempertahankan zero konflik. Selanjutnya apa tugas kita adalah mendidik generasi muda agar mereka punya jiwa modern tapi tidak memodernisasi agama,” ucap Herman Deru saat bersama Jemaat Gereja HKBP Palembang. •RDR







“Menurut saya ini tidak elok dan tidak tepat kalau memang sampai dibatasi untuk usia calon Presiden, mungkin pihak-pihak yang berkepentingan tentunya akan melakukan berbagai cara untuk menjegal lawan”

Mohammad Zulkifli Yassin

INFO  
DAPIL

Minggu I • Oktober 2023

15

# RELAWAN CAPRES BEREBut SIMPATI DI DAERAH

**Selain koalisi partai politik yang solid, kerja keras dari para relawan pendukung calon presiden juga patut diapresiasi. Bahkan banyak kalangan menilai loyalitas para relawan ini lebih tinggi daripada simpatisan partai. Hal ini bisa dilihat dari pergerakan yang mereka lakukan hingga ke desa-desa.**

Faktor kekaguman dan simpati yang tinggi membuat para relawan ini mau bekerja keras turun ke lapangan agar calon mereka menang di pemilihan presiden. Sehingga tidak heran mereka juga harus keluar biaya sendiri untuk turun mempromosikan calon presiden yang dikagumi.

Tidak seperti partai koalisi yang lebih memfokuskan visi misi kedepan, para relawan cenderung lebih mengedepankan sosok calon presiden yang mereka usung dengan mengumbar segala kebaikan yang ada.

Koordinator Relawan Ganjaris Sumsel Desmon Simanjuntak mengungkapkan, kalau Ganjaris di Sumsel sudah terbentuk sejak tahun 2021 atau sebelum adanya koalisi. Relawan Ganjaris sangat mengagumi sosok Ganjar Pranowo dalam segala hal.

Atas dasar itu juga mereka sejak tahun 2021 lalu sudah menyatakan diri mengusung dan mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi calon Presiden RI di tahun 2024 mendatang.

“Untuk pergerakan relawan Ganjaris Sumsel kami sudah bergerak dan memakai strategi pergerakan seperti melakukan propaganda mengenai track records Ganjar Pranowo itu sendiri dan melakukan pengorganisasian serta melakukan pengorganisasian. Fokus satuan relawan Ganjaris sendiri yaitu melakukan perekrutan ke masyarakat yang ada di Sumsel,” tegas Desmon.

Bagi Ganjaris Sumsel, tidak ada tawar menawar lagi untuk mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden RI. Dimana sekarang ini mereka sudah tersebar

di 17 kabupaten/ kota di Sumatera Selatan.

Diakui Desmon Simanjuntak, secara sejarah, kondisi di Sumatera berbeda dengan Pulau Jawa. Dimana sebagian besar wilayah Sumatera termasuk Sumsel bukanlah basis Joko Widodo maupun Ganjar Pranowo.

“Untuk itulah kami sebagai satuan relawan Ganjaris Sumsel targetnya cuma satu yakni kami harus kerja lebih militan. Lebih berjuang untuk mempropagandakan supaya masyarakat Sumsel lebih mengetahui sosok dan track records Ganjar Pranowo itu sendiri,” jelasnya.

Semoga dengan langkah-langkah tersebut masyarakat Sumsel terbuka hati dan pikirannya, dengan mengatakan ini lah sosok yang tepat untuk menjadi Presiden RI di tahun 2024 mendatang.

Sedangkan target relawan Ganjaris Sumsel secara Umum yakni terus membangun satuan relawan hingga ke tingkat kelurahan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

“Yang kami ketahui sosok Ganjar Pranowo ini humanis, anti radikalisme dan sosok beliau juga sangat Bhineka Tunggal Ika, artinya beliau tidak pernah membedakan antara Suku, Ras dan Agama, bahkan berdasarkan track records dan re-

kam jejak digital bagaimana beliau memimpin Provinsi Jawa Tengah selama dua periode termasuk pemimpin yang sangat dekat dengan masyarakat,” terangnya.

Sebagai relawan Ganjar Pranowo, mereka tidak terlalu memikirkan siapa yang menjadi Cawapres.

“Artinya kami tidak memikirkan siapa Cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo, kami hanya fokus untuk memenangkan Ganjar di Sumsel dan Palembang khususnya untuk menjadi Presiden di 2024 nanti,” tegasnya.

Sedangkan dari sayap Partai Kebangkitan Bangsa yaitu, Badan Otonom (Banom) Perempuan Bangsa PKB, selain tetap fokus di pemilihan legislatif mereka juga fokus pada kemenangan Pilpres 2024 ini.

Duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dinilai sebagai komposisi ideal untuk Indonesia lebih baik dan maju lagi.

Selain visi misi dari duet ini juga sama dengan PKB sehingga selain melakukan sosialisasi di pemilihan legislatif mereka juga mengenalkan sosok Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan ideal di Pilpres 2024 ini.

“Untuk Pileg dan Pilpres nanti kami sudah berkoordinasi dengan PAC-PAC hingga ke daerah perairan. Bahkan kita sudah terbentuk hingga ke Anak Ranting untuk siap membantu kemenangan Ketua Umum kita (Muhaimin Iskandar),” ucap Banom Perempuan Bangsa PKB Kabupaten Banyuasin, Silviana.

Dikatakan Silviana, berdasarkan arahan dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, selain harus tetap fokus menjalankan program-program partai di Pileg mereka juga terus membantu mensosial-

isasikan kemenangan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Sehingga kami yakin dan semangat serta optimis bahwa partai Islam masih dicintai, sesuai dengan semboyan PKB, Bangkit, Solid, Menang. Intinya kami sangat mendukung Ketua Umum kami berdampingan dengan Anies Baswedan,” tegasnya.

Tekad yang sama disampaikan Mohammad Zulkifli Yassin selaku Ketua Pimpinan cabang Satuan Relawan Indonesia Raya Satria Gerindra yang menyatakan siap menjadi motor utama untuk mengangkat partai agar bisa terbang lebih tinggi lagi.

“Saat ini kami berusaha secara maksimal dalam rangka memenangkan sosok Prabowo Subianto menjadi Presiden pada Pemilu di tahun 2024. Kami murni mendukung Prabowo Subianto tanpa ada embel-embel akan mendapatkan sesuatu, dan sebagai sayap partai sudah menjadi kewajiban apa diperintahkan pimpinan kita akan tegak lurus,” tegas Zulkifli.

Di Pemilu 2024 ini Zulkifli merasa optimis Prabowo Subianto memenangi kontestasi Pilpres 2024. Dimana dari tiga kandidat yang ada, mereka melihat sosok Prabowo Subianto adalah yang terbaik.

“Prabowo merupakan calon yang paling berpengalaman baik dari sisi usia, pengalaman dalam pemerintahan maupun pengalaman dalam kompetisi atau kontestasi dalam pemilu ini. Jadi kami sangat yakin ini merupakan momen tepat untuk Prabowo untuk menjadi Presiden RI mendatang,” tegasnya.

Terkait penyebaran isu-isu negatif terhadap Prabowo Subianto, mereka sebagai sayap partai memandangnya sebagai kaset rusak yang diputar-putar terus pada saat menjelang pemilu.

Tujuannya tidak lain adalah untuk menjatuhkan sosok Prabowo. Padahal kenyataannya hingga sekarang tidak ada langkah hukum apapun terhadap Prabowo.

“Kalau memang beliau dinyatakan bersalah tentunya akan dihukum, terbukti hingga sampai saat ini tidak ada satupun Presiden yang memproses Prabowo terhadap isu itu, artinya memang tidak terbukti tuduhan-tuduhan itu,” terangnya.

Terkait batas usia calon Presiden yang dinilai sebagai upaya penjegalan terhadap Prabowo Subianto, hal itu dinilai Zulkifli juga terlalu berlebihan. Dimana semakin matang usia seseorang maka kebijaksanaan seseorang akan semakin baik, baik dari pengalamannya dan dengan segala macamnya.

Di banyak negara ada pemimpin yang umurnya lebih tua dari Prabowo seperti Li Kuan Yu dari Singapura, Mahatir Muhammad dari Malaysia.

“Menurut saya ini tidak elok dan tidak tepat kalau memang sampai dibatasi untuk usia calon Presiden, mungkin pihak-pihak yang berkepentingan tentunya akan melakukan berbagai cara untuk menjegal lawan. Salah satunya walaupun saya yakin tidak sampai ke arah situ,” tuturnya. •RDR





“Sebenarnya boleh karena bukan kampanye untuk berpolitik tetapi kampanye yang bersifat edukasi. Itu yang dimaksudkan oleh MK, kalau edukasi saya menilai boleh saja”

*Bagindo Togar Butar Butar*



# JANGAN LIBATKAN SISWA DI POLITIK!

**Meski dibolehkan ternyata siswa sekolah juga punya sikap tersendiri di Pemilu 2024 ini. Dimana para pelajar di Sumatera Selatan menolak apabila Pemilu 2024 harus melibatkan mereka dengan dalih edukasi politik.**

**M**enurut para siswa apapun dalihnya, belum saatnya mereka diberikan doktrin-doktrin politik seperti keinginan para politisi. Mereka lebih ingin fokus belajar selain itu juga akan mengganggu proses belajar mengajar karena pada saat yang sama mereka juga harus menentukan masa depan selanjutnya usai tamat sekolah.

Di sisi para politisi juga sering tidak memberikan edukasi yang baik ke masyarakat karena banyaknya oknum terlibat korupsi dan aksi kriminal lainnya.

Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA N 8 Palembang Muhammad Muwawicha menegaskan mereka menolak kampanye dari Parpol masuk ke sekolah.

“Kami pelajar SMA N 8 menolak kalau ada kampanye di sekolah karena kami masih pelajar jangan libatkan berpolitik,” kata dia.

Disebutkannya walaupun dalihnya untuk edukasi politik tetap saja mereka menolak. Bagi mereka pembelajaran proses demokrasi masih dinilai terlalu berat ke mereka.

“Kita disini sudah berorganisasi dengan cara belajar. Hal itu untuk kami belajar bagaimana demokrasi di sekolah. Saya rasa itu sudah cukup jadi kami tidak perlu pelajaran politik itu terlalu berat. Karena tugas utama kami disini belajar bukan juga belajar berpolitik,” ungkapnya.

Menurutnya apabila Pemilu 2024 mencari suara di kalangan pelajar juga kurang efektif. Dimana hanya sedikit saja pelajar berumur 17 tahun memiliki KTP. Terlebih lagi mereka semua pelajar yang sudah kelas 12.

“Banyak disini kelas 12 itu sedikit yang punya KTP, sebab pelajar sibuk sekolah dan les. Jadi mereka tidak sempat bikin KTP, jadi hanya sedikit saja. Makanya saya menilai kampanye di kampus itu tidak efektif juga,” pungkasnya.

Hal sama diungkapkan Ketua OSIS SMK Madyatama Aditya Saputra juga menyatakan penolakan yang sama. Baginya kampanye di sekolah hanya mengganggu proses belajar mengajar di sekolah saja.

“Pastinya menolak karena kami mau be-

lajar terganggu. Lagian tidak terlalu utama mendengar kampanye Parpol bagi kami belajar yang harus diprioritaskan,” tegasnya.

Dia menyebutkan lingkungan sekolah itu seharusnya bersih dari praktik politik. Hal itu karena mata pelajaran sudah menjadi konsentrasi utama untuk semua pelajar.

“Tidak terlalu utama makanya untuk apa buat kami,” jelasnya.

Dia berharap pemerintah tidak mencampur adukkan urusan dunia pendidikan dan Pemilu 2024 karena kondisi ini akan memberatkan pihak mereka sebagai pelajar yang belum layak untuk berpolitik.

Humas SMAN 8 Palembang Zabidi menjelaskan sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu dan mendidik generasi penerus bangsa. Baginya politik adalah dimensi berbeda yang terlalu kompleks untuk seorang pelajar.

“Kami dari sekolah juga tidak ingin adanya kampanye di lingkungan pelajar. Karena tidak hanya mengganggu pelajar tenaga pendidik juga pastinya terganggu,” kata dia.

Dilanjutkannya mereka sebagai tenaga pendidik sudah susah memberikan ilmu

yang bermanfaat dan berguna untuk dasar pendidikan kepada pelajar. Apabila ada ilmu politik masuk ke sekolah tidak relevan bagi pelajar terkecuali tingkat mahasiswa.

“Kalau mahasiswa tidak masalah kalau pelajar tidak cocok. Walaupun edukasi politik tetap saja tidak baik untuk pelajar. Kami sudah mendidik mereka susah-susah nanti ada pemahaman yang kurang baik kepada mereka bagaimana siapa yang bertanggung jawab,” ungkapnya.

Dia menggambarkan politik adalah terkadang menjatuhkan pesaing politik lainnya. Untuk pelajar masuk wilayah itu terlalu beresiko.

“Banyak yang sudah S1 S2 S3 sekalipun kalau sudah berpolitik bisa saling menjatuhkan atau berlawanan pandangan. Nah bagaimana dengan siswa kami yang prosesnya mereka masih belajar di sekolah,” ucapnya.

Kepala Sekolah SMKN 2 Palembang Rafli menjelaskan, pihaknya kalau menolak secara tegas tidak mungkin karena sudah ada aturan dari MK memperbolehkan. Namun sistem harus jelas bagaimana jangan sampai mengganggu.

“Kita tidak bisa menolak secara tegas, tentunya memberikan izin kalau sudah diperbolehkan oleh pemerintah dan MK,” ucapnya.

Dia menilai keputusan itu diharapkan kedepannya di t a h u n

politik Pemilu 2024 akan diperjelas lagi biar pihak sekolah tidak bingung.

“Kita belum jelas dan tahu aturannya, kembali lagi semoga KPU dan Bawaslu sebelum Pemilu 2024 terjadi harus sosialisasikan aturan itu ke setiap sekolah biar kami tahu jelas,” pungkasnya.

## Boleh Asal Jelas

Sementara pengamat politik Sumatera Selatan Bagindo Togar Butar Butar menyebutkan sebenarnya pemahaman berpolitik di sekolah itu harus dipahami terlebih dahulu. Dia menyebutkan ranahnya lebih kepada pendidikan alias edukasi.

“Sebenarnya boleh karena bukan kampanye untuk berpolitik tetapi kampanye yang bersifat edukasi. Itu yang dimaksudkan oleh MK, kalau edukasi saya menilai boleh saja,” jelasnya.

Dia menelisik aturan baru MK ini dicoba untuk dijalankan dan melihat efek untuk generasi bangsa. Karena jumlah untuk pemilih generasi muda sangat besar soalnya sekarang kau tidak mau mereka harus mendapatkan pendidikan politik tersebut.

“Kalau ada aturan jelas pastinya bagus untuk dunia pendidikan. Kalau kata saya tadi boleh asal jelas dan bernilai edukasi,” pungkasnya. ●RDR







“Saya banyak mendengar keluhan teman-teman yang memiliki percetakan, ada caleg-caleg yang mencetak alat peraga namun sisa uang pencetakan alat peraga tidak dilunasi, bahkan ada yang sama sekali tidak dibayar”

**Bagus Edu Gunawan**

# AKSI TIPU MENIPU INI SERING TERJADI DI PEMILU

**Memasuki pelaksanaan Pemilu 2024 ini, semua kandidat mulai dari Capres, Caleg hingga calon kepala daerah tentu bersaing berebut simpati dengan memberikan hal baik. Demikian juga masyarakat juga menerima respon dengan baik. Meski demikian semua penampilan baik dan menawan itu hanya semua penampilan semu saja.**

**W**ujud asli para calon akan terlihat setelah Pemilu terutama setelah pemilihan legislatif. Baik masyarakat atau para mantan calon akan terlihat siapa yang menipu siapa. Sehingga tidak heran banyak ditemukan para mantan Caleg yang mengalami stres karena merasa ditipu saat pencalegan.

Di sisi lain ada juga diantara mereka ini yang meninggalkan banyak hutang dan enggan membayar terkait pemesanan banner, spanduk dan lain-lainnya.

Seperti diungkapkan Rizky Pratama Saputra (40), caleg PDI Perjuangan Kota Palembang yang bergabung di PDIP sejak 23 tahun lalu. Kini dia didapuk menjadi Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Alam (Baguna) DPC Palembang PDI Perjuangan.

Untuk ketiga kalinya, dia mencoba peruntungan di pemilihan legislatif (pileg) yakni tahun 2014, 2019 dan di Pemilu 2024 ini. Bila ditotal lebih dari Rp 2,5 miliar

uang yang sudah dihabiskannya di pencalegan tersebut.

“Kalau mau dibilang stres ya stres bang, untungnya tidak masuk ke rumah sakit jiwa saja. Tapi bagi saya kegagalan itu bukan segalanya makanya di Pemilu 2024 ini saya maju lagi semoga berhasil,” kata Rizky yang biasa disapa RPS.

Selama mengikuti pencalegan ini tentu sudah banyak uang dikeluarkan mulai dari merekrut tim sukses, melakukan kunjungan ke dapil-dapil, membuat alat peraga untuk sosialisasi dan kegiatan lainnya. Bahkan dia sempat menjual tanah warisan orangtua.

“Semua aspirasi kita tampung mulai dari hal kecil seperti ngopi-ngopi sampai lainnya, kita coba bantu. Namun pas waktu Pencalegan ternyata hasilnya tidak sesuai harapan,” kata Rizky.

Di Pemilu 2019 lalu dia sempat mengeluarkan uang hingga Rp 1 miliar lebih namun kembali dia juga menjadi korban janji-janji manis oknum masyarakat yang hanya mencari keuntungan sesaat saja.

Sementara di Pemilu 2024 ini dia kembali mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Palembang dari di Dapil 6 yang meliputi kawasan Seberang Ulu (SU) 1, Keratapati dan Jakabaring Palembang.

Untuk pencalegan kali ini RPS menyiapkan

dana sekitar Rp 500 juta. Bahkan dua kendaraan roda empatnya sudah dijual.

“Sebetulnya keluarga sempat mengingatkan kalau bisa tidak usah menyalon lagi tapi saya tetap penasaran karena tujuan saya yakni ingin berbuat kebaikan untuk masyarakat. Kalau soal tipu-menipu ini saya juga punya pengalaman dan Insya Allah di Pemilu 2024 tidak saya alami lagi,” terangnya.

Di kalangan pengusaha dan masyarakat juga sering menjadi korban penipuan seperti banyak Caleg yang lari dari tanggung jawab untuk melunasi tagihan ke percetakan.

Pemilik usaha percetakan Yusnita Anggraeni mengatakan, pada Pemilu 2019 ada beberapa caleg yang tidak membayar pesannya tanpa tahu apa alasannya meski dilihat secara materi mereka itu mampu.

“Bahkan teman-teman yang memiliki usaha percetakan, ada yang tidak dibayar hingga sampai milyaran. Ada usahanya sampai tutup karena terilit hutang miliaran karena jadi korban janji manis Cale. Jadi sekarang kami harus pilih-pilih,” Yusnita pemilik usaha.

Untuk mengantisipasi penipuan ini mereka memberlakukan pembayaran uang muka minimal 10 persen dan harus lunas saat barang diterima.

“Kami tidak

melayani pembayaran setelah caleg terpilih karena berdasarkan pengalaman di 5 tahun dan 10 tahun ke belakang banyak juga teman-teman yang termakan janji Caleg,” ucapnya.

Di sisi lain beberapa Caleg sekarang banyak yang mencetak sendiri spanduk, banner dan lainnya. Dimana biaya untuk mencetak alat peraga nilainya hampir sama dengan membeli mesin cetak itu sendiri.

Sementara itu salah satu mantan Caleg yang pernah beberapa mengikuti pencalegan, Bagus Edu Gunawan mengatakan, memang dibutuhkan biaya yang tidak kecil karena memang butuh sosialisasi.

“Tujuan dari pencetakan alat peraga tersebut adalah yang sifatnya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, makna sederhana seperti itu,” tegas Bagus.

Namun terkadang alat peraga yang dipasang untuk sebagian masyarakat malas untuk membacanya, apalagi sudah terlalu banyak caleg-caleg yang menempelkan alat peraganya di setiap sudut ataupun space yang menurutnya strategis. Hal itu juga membuat sebagian masyarakat acuh bahkan terkadang hanya melihat gambar saja sementara nama calegnya tidak tahu.

“Menurut saya langkah yang paling tepat adalah turun langsung untuk bertemu dengan masyarakat untuk memperkenalkan diri, itu lebih bagus, lewat jaringan masing-masing, ketika bertemu dengan masyarakat baru tawarkan program-program menurut saya itu yang lebih efektif,” terang pria yang kini berprofesi sebagai advokat tersebut.

Berdasarkan pengalamannya yang sudah tiga kali mengikuti pencalonan, banyak Caleg yang bermasalah dengan percetakan karena belum membayar pelunasan. Sementara modal mereka juga sudah habis untuk operasional pencalegan.

“Saya banyak mendengar keluhan teman-teman yang memiliki percetakan, ada Caleg-caleg yang mencetak alat peraga namun sisa uang pencetakan alat peraga tidak dilunasi, bahkan ada yang sama sekali tidak dibayar, tapi terkadang teman yang mempunyai percetakan mengikhlasakan saja,” ungkap Ketua Aliansi Untuk Keadilan ini.

Di sisi lain ada juga yang saling pengertian setelah mereka tahu kondisi-kondisi Caleg yang tidak terpilih uang sudah banyak habis.

Sementara Bagus yang sempat mencalonkan diri sebagai caleg dari partai PKPB, PAN, dan Partai Nasdem meskipun tidak pernah terpilih namun tetap melakukan pembayaran alat peraga

“Memang terkadang kawan-kawan yang memiliki percetakan yang menjadi korban dari para Caleg gagal ini,” tuturnya. ●RDR







Muhammad Said Didu

# ARSUL SANI TITIPAN DPR DI MK

**Komisi III DPR sepakat memilih rekan mereka sesama legislator, Arsul Sani, sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Wahiduddin Adams. Potensi konflik kepentingan yang muncul dari penunjukan itu dikesampingkan oleh para anggota dewan.**

Pemilihan Arsul Sani merupakan ujung dari uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap tujuh calon hakim konstitusi. Sembilan fraksi menyatakan sepakat untuk memilih Arsul Sani.

“Semua menyatakan menyetujui Bapak Arsul Sani. Oleh karena itu, Komisi III memutuskan, calon yang diusulkan oleh DPR menjadi hakim konstitusi menggantikan Bapak Wahiduddin Adams adalah bapak Arsul Sani,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir, membacakan hasil rapat pleno, Selasa, 26 September 2023.

Setelah dipilih, nama Arsul akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disetujui. Setelah itu, nama Arsul akan diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk dilantik. Melalui uji kepatutan dan kelayakan, Arsul menyinkronkan calon hakim lainnya, di antaranya Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriadi Azhari, Abdul Latif, dan Hardi Hasan.

Langkah memilih Arsul Sani yang merupakan Wakil Ketua MPR sekaligus anggota Komisi II ini dilakukan DPR setelah mereka juga cawe-cawe dalam susunan hakim di lembaga penguji legislasi tersebut. Tepat setahun lalu, DPR memutuskan mencopot hakim Aswanto dari posisinya di MK. Langkah itu mendapat protes keras dari sembilan mantan hakim MK, termasuk beberapa mantan ketua MK.

DPR saat itu beralih bahwa Aswanto kerap membatalkan undang-undang atau poin undang-undang yang disusun DPR saat diuji ke MK. Lain kata, Aswanto dicopot karena melakukan pekerjaannya, yakni menguji konstitusionalitas beleid yang dikeluarkan DPR.

Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto, tak menampik akan ada konflik kepentingan dalam pe-

nunjukan Arsul Sani. “Tidak ada di dunia ini yang tidak ada conflict of interest-nya. Conflict of interest ada, tetapi patut apa tidak, itu yang penting patut opo ora,” ujar Bambang.

Selain berpatokan dengan hukum, menurutnya wajar apabila hakim MK memiliki kepentingan politik. Apalagi, tiga dari sembilan hakim MK diusulkan oleh DPR yang ditetapkan lewat uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisi III.

“Maka itu adalah perkawinan antara hukum murni dan kebijakan politik. Oleh karena itu ada saat bagi kami, untuk hakim MK paham keputusan politik,” ujar Bambang.

Dia mengatakan pengujian kali ini adalah untuk menyaring hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR. Menurutnya, hakim konstitusi yang merupakan wakil dari DPR haruslah menyuarakan suara dari lembaga-

nya. “Artinya banyak hal peraturan perundangan yang mesti dikau menyuarakan suara DPR, fakta yang pernah terjadi adalah hakim MK yang berasal dari DPR itu justru men-downgrade

keputusan-keputusan DPR,” ujar Bambang.

Bambang juga terkesan menyarankan hakim MK nantinya mesti berkonsultasi dengan DPR sebelum mengambil keputusan tentang uji materi undang-undang tertentu. Bahkan, ia tak mempermasalahkan konsultasi tersebut dilakukan di ruang tertutup.

Atas kesediaannya melakukan konsultasi sebelum keputusan inilah Arsul Sani kemudian dipilih oleh Komisi III. “Kita tidak pernah diajak (MK) bicara, tiba-tiba dibatalkan, padahal kita kerjakan, dibatalkan. Kenapa? karena mohon maaf, karena tidak ada satupun yang punya profesi sebagai DPR, memahami SOP yang ada di DPR,” ujar Bambang.

“Itu salah satu pertimbangan beberapa kawan tadi yang memilih Arsul Sani dan juga memang menguasai S1 juga di hukum dan juga di DPR,” sambungnya.

Saat diuji kelayakan, Arsul Sani memang menyanggapi hal tersebut. “Mendiskusikan di ruang tertutup karena ada dampak-dampak yang negatif, itu menurut saya bukan hal yang terlarang, sama kok seperti kita DPR melakukan eksaminasi terhadap putusan. Paling tidak mendengarnya, tidak kemudian bikin komitmen (dengan DPR),” ujar Arsul.

Arsul memastikan dirinya independen dan tak memihak meskipun diusulkan oleh DPR. “Independensi itu buat hakim adalah suatu keharusan ya, terlepas dari siapapun dia itu dia berasal. Jangan juga kemudian diasumsikan bahwa karena dia dari DPR dia tidak independen,” kata Arsul.

Menurut Arsul, sembilan hakim MK haruslah independen dan imparial dalam menjalankan tugasnya menjaga konstitusi. Padahal sembilan hakim tersebut diusulkan oleh DPR, Mahkamah Agung (MA), dan presiden.

Meski dalam menjalankan tugasnya harus independen, bukan hal yang salah jika MK berkonsultasi den-

gan DPR terkait sebuah gugatan. Namun, konsultasi tersebut bukan dalam rangka untuk menjalin komitmen sebelum mengeluarkan putusan.

“Jadi kalau independensi itu adalah sebuah keharusan, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, bukan karena kita khawatir tidak independen kemudian tidak mau mendengarkan, tidak mau menggali, termasuk mendengarkan dari para ahli,” ujar Arsul.

Di samping itu, Arsul berjanji akan melepaskan semua jabatannya di DPR, MPR, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kini, tujuannya di MK adalah untuk membuat lembaga tersebut menjadi lebih baik ke depan.

“Tidak kemudian masing-masing menunjukkan ego sektoral atau ego sentralnya masing-masing dan keinginan. Saya mudah-mudahan bisa berkontribusi agar kemudian tidak ada ketegangan-ketegangan antarlembaga negara yang terjadi,” terang Arsul.

Arsul juga menyatakan tidak akan terlibat di panel hakim yang menangani sengketa hasil pemilu terkait PPP di MK. Hal ini untuk mencegah konflik kepentingan karena Arsul merupakan wakil ketua umum PPP.

“Saya tidak boleh ada dalam panel yang mengadili sengketa yang melibatkan PPP, itu dulu untuk benturan kepentingan,” ungkapnya.

Dalam menangani sengketa hasil sengketa pemilu, kata Arsul, MK akan membagi panel untuk menangani setiap sengketa hasil pemilu. Menurut dia, sembilan hakim MK akan dibagi dalam tiga panel.

“Kalau dalam (sengketa) pilpres pasti tidak terhindarkan, karena tidak ada panel, tetapi kalau pileg, tidak. Itu kan memang akan dibuat dalam panel-panel. Tentu saya harus minta saya tidak boleh ada dalam panel,” tegas Arsul.

Peneliti Themis Indonesia, Hemi Lavor, mengatakan, meski diusulkan DPR, dirinya berharap Arsul Sani tidak menjadi utusan DPR di MK.

Dia meminta Arsul tetap independen dalam mengadili produk-produk legislasi DPR yang dibawa ke MK. “Kekuasaan yudisial di MK jangan sampai hanya jadi tong sampah produk legislasi DPR,” ujarnya.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memberikan reaksi soal terpilihnya Arsul Sani sebagai calon hakim MK. Said Didu menyayangkan, Arsul Sani merupakan seorang politisi. Dia pun dipilih menjadi calon hakim oleh politisi juga.

“Politisi jadi hakim yang dipilih oleh politisi,” kata Said Didu, Kamis 28 September 2023.

Pria kelahiran Pinrang Sulsel itu menyebut, keadilan akan sulit diharapkan jika yang memilih hakim bagian dari para Politisi.

“Sangat sulit mengharap keadilan dari cara memilih hakim oleh politisi,” ujarnya.





“Saya ulangi,  
jagalah netralitas  
Polri dalam meng-  
amankan Pemilu  
2024”

**Mahfud MD**

# POLRI JANGAN MEMIHAK PETAKAN POTENSI KONFLIK

**Polri diharapkan aktif memetakan potensi konflik untuk mendukung suksesnya Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Sebab, peran aparat keamanan merupakan salah satu kunci dalam menjaga situasi aman dan stabil saat pesta demokrasi.**

“Dari kepolisian, saya harapkan betul tidak hanya bekerja responsif, tetapi juga bekerja proaktif untuk mendinginkan suasana dan membaca potensi konflik dengan tepat dan akurat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 28 September 2023.

Tito melihat beberapa konflik yang muncul tidak langsung terjadi begitu saja, tetapi ada proses yang melatarbelakangi. Oleh karena itu, perlu prediksi berupa pemetaan potensi konflik lebih baik supaya konflik tidak meletup.

Tito juga berharap intelijen, baik di daerah maupun pusat, betul-betul kuat selama tahapan Pemilu Serentak 2024, terlebih digelar pula Pilkada yang memerlukan pengamanan.

“Betul-betul dipetakan daerah itu yang mana yang aman, mana yang rawan, mana yang sangat rawan, sehingga yang sangat rawan bisa menjadi tambah kekuatan di situ,” tambahnya.

Dia menegaskan, akurasi pemetaan kerawanan menjadi penting untuk mendukung keberhasilan pilkada. Dia pun tak ingin Polri baru bergerak setelah konflik terjadi.

Selain itu, perlu juga adanya penyebaran pasukan di wilayah tertentu berdasarkan tingkat kerawanan, sehingga sigap bergerak dan tak menunggu bantuan pasukan dari pusat.

“Jadi, kuncinya adalah, sekali lagi, masalah akurasi dan mohon dilakukan simulasi-simulasi untuk memperkuat sinergi antara TNI/Polri, Satpol PP, dan Satlinmas,” ujar Tito.

Dia pun percaya menjalankan tugas baik dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Saat ini, kepublikan terhadap Polri makin meningkat, sehingga modal untuk kan agenda nasional tersebut. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja,

Polri dapat gasnya dengan mendukung Pilkada Serentak. Apalagi, kepercayaan terhadap institusi meningkat, menjadi pengamanan politik Indonesia.

ja, juga mengingatkan personel Polri untuk tidak melanggar aturan bahwa polisi harus netral dalam gelaran Pemilu 2024, termasuk di media sosial. Dia meminta aparat kepolisian untuk tidak menyukai, memberikan komentar, dan membagikan konten terkait peserta pemilu.

“Hati-hati. Dulu orang berkata mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Jangan like, comment dan share (terkait dukungan) calon presiden, tidak boleh, polisi harus menjaga itu,” kata Bagja di hadapan ribuan calon perwira Polri di Sukabumi, Jawa Barat, Kamis, 28 September 2023.

Bagja juga meminta personel Polri dan TNI hati-hati ketika berfoto. Jangan sampai berfoto dengan kandidat tertentu yang mengarah pada keberpihakan, lalu diunggah ke media sosial.

“Semoga bapak ibu orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran netralitas ASN, jaga media sosial masing-masing. Jangan di TikTok joget melambankan angka dan lainnya, terlebih sedang mengenai pakaian dinas,” ujarnya menegaskan.

Menurut dia, media sosial kemungkinan akan menjadi wahana yang paling banyak terjadi pelanggaran pada Pemilu 2024. Kendati begitu, Bagja mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi.

Dalam kesempatan lainnya, Bagja mengatakan Bawaslu akan membuat perjanjian kerja sama (MoU) dengan Polri dan TNI terkait ketentuan teknis pemeriksaan aparat yang terjerat persoalan hukum pemilu.

“MoU tersebut didasari oleh terdapat anggota TNI dan Polri yang turut diancam sanksi pidana oleh UU Pemilu. Maka, Bawaslu menilai perlu untuk disusun sebuah MoU dan perjanjian kerja sama,” kata Bagja dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Jakarta, Rabu, 27 September 2023.

Dalam kegiatan itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum), Mahfud MD, menyampaikan mengenai tahapan

dan tantangan Pemilu Serentak 2024 serta pentingnya tugas Polri dalam menjaga, mengawal, dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Polri memiliki tugas untuk menjaga kamtibmas dengan melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan tugas Polri sangat dekat dengan Masyarakat, sehingga keberadaan polisi akan disorot karena berpotensi mendapat persepsi negatif, meskipun juga mendapat pujian positif dari masyarakat.

“Semua tergantung pada peristiwa-peristiwa yang ditangani yang menyertai setiap perkembangan,” jelasnya.

Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menambahkan, kinerja Polri juga menjadi sorotan Presiden Joko Widodo, yang pada HUT ke-77 Polri, berpesan agar Polri harus tetap solid, tidak ada blok-blok dan patron-patron, dan lain sebagainya.

Pesan Presiden Jokowi berikutnya, lanjut Mahfud, Polri harus terus berbenah diri dan melakukan reformasi di seluruh aspek, meskipun saat ini tingkat kepercayaan publik meningkat. Polri tidak boleh menyalahgunakan wewenang dan harus menegakkan hukum secara adil, yang tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Polri juga diingatkan harus beradaptasi melakukan inovasi di berbagai bidang dan menjaga netralitas dalam mengamankan Pemilu 2024.

“Saya ulangi, jagalah netralitas Polri dalam mengamankan Pemilu 2024,” tegas Mahfud.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, menyatakan, Polri bakal menggelar operasi terpusat dengan sandi ‘Mantap Brata’ untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024. Polri mengerahkan 2.130 personel di tingkat markas besar (mabes) untuk terjun dalam operasi tersebut.

“Operasi Mantap Brata 2023-2024 dipimpin oleh Kabaharkam Polri (Kojen Fadil Imran) selaku Kepala Operasi, dan dibantu oleh

Dankor Brimob Polri Komjen Anang Revandoko selaku Wakil Kepala Operasi,” ujar Ramadhan.

Operasi Mantap Brata dilaksanakan selama 222 hari, dari tahap pendaftaran hingga pengambilan sumpah oleh pasangan presiden-wakil presiden terpilih. Ramadhan mengatakan operasi ini nantinya bakal melibatkan 11 satuan kerja dari Mabes Polri.

Sebelas satuan yang dimaksud adalah Bareskrim, Baintelkam, Baharkam, Korbirimob, Slog, Divisi Humas, TIK, Propam, Hubinter, Srena, dan Irwasum. Kemudian, sebelas satuan kerja itu akan ditempatkan ke dalam sembilan satuan tugas yang berbeda.

Satgas tersebut di antaranya Pengamanan Capres-Cawapres, Preemptif, Preventif, Penindakan, Gakkum, Antiteror, Pengaman TPS Luar Negeri, Humas, dan Banops.

“Pola pengamanan pada TPS diatur sesuai tingkat kerawannya. Yaitu TPS kurang rawan, TPS rawan, dan TPS sangat rawan,” jelasnya.

Ramadhan menuturkan, ada 2.130 personel dari Mabes Polri yang akan dilibatkan dalam Operasi Mantap Brata. Sedangkan untuk pengerahan personel di tingkat satuan wilayah Polda akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dari APBN.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan Polri juga menyiapkan berbagai kesiapan menghadapi Pemilu 2024. Mulai personel, metode, hingga komunikasi kepada masyarakat.

“Kepolisian menyiapkan dengan berbagai rencana operasi untuk kesiapan pemilu, pertama Operasi Mantap Brata, itu menjadi bagian rutin setiap pemilu Polri pasti akan melaksanakan Mantap Brata untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu,” kata Sandi, Agustus 2023.

Dia berharap langkah-langkah yang disiapkan Polri dapat berjalan dengan baik. Jadi, keamanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dapat terjamin.

“Jadi kunci utama agar pemilu berjalan sehat dan baik adalah keamanan itu terjamin. Dan dengan keamanan tadi, insya Allah semua penyelenggaraan pemilu dan rangkaiannya bisa kita tuntaskan bersama,” tuturnya.

•RDO





“Masuknya Kaesang ke PSI juga menunjukkan kalau kaderisasi di PDIP ada masalah. PDIP belum memberikan kesempatan pada anak muda untuk tampil ke depan sehingga tokoh-tokoh muda seperti Maruarar Sirait dan lainnya tenggelam”

*Ardiyan Saptawan*



# PSI MENGGGERUS SUARA PDIP

**Masuknya Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo menjadi kader dan didaulat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa menunjukkan salah satu manuver politik nyata untuk menggerus suara dari PDI Perjuangan. Keputusan PSI mendaulat Kaesang Pangarep juga menunjukkan upaya kritik anak muda terhadap pola politik tradisional yang ditunjukkan PDIP dan beberapa partai lain.**

**S**elama ini peran politik masih didominasi sistem senioritas dan menggunakan politik urut kacang tanpa melihat potensi besar dari p@olitisi muda. Bergabungnya Kaesang ke PSI juga cukup merugikan PDIP karena bisa menggerus suara PDIP di Pemilu 2024 khususnya dari kalangan anak muda.

“Hal itu juga bisa menunjukkan kalau Jokowi merasa tidak nyaman berpolitik di PDIP. Kami melihat ada dua kelompok loyalis di PDIP yakni yang loyal pada Jokowi dan pada Megawati. Namun tetap saja Jokowi masih kalah pamor dengan Megawati di PDIP,” ungkap pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Ardiyan Saptawan.

Dosen FISIP Unsri ini mengungkapkan, di Pemilu 2024 ini Jokowi tetap menunjukkan kekuatan dan manuver politiknya. Hal itu bisa dibaca saat Pro Jokowi (Projo) memilih Prabowo daripada Ganjar Pranowo.

Dua anaknya, Gibran Rakabuming dan Kaesang menunjukkan kedekatannya pada Prabowo hingga akhirnya memunculkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal revisi usia.

Selanjutnya, masuknya Kaesang Pangarep dan menjadi Ketua Umum PSI sekaligus menegaskan sebagai partai pendukung total Joko Widodo. Hal itu menunjukkan kalau pamor Jokowi sebenarnya masih sangat kuat.

“Masuknya Kaesang ke PSI juga menunjukkan kalau kaderisasi di PDIP ada masalah. PDIP belum memberikan kesempatan pada anak muda untuk tampil ke depan sehingga tokoh-tokoh muda seperti Maruarar Sirait dan lainnya tenggelam. Ini jelas merugikan PDIP sendiri,” terang mantan anggota KPU Sumsel tersebut.

Ardiyan Saptawan juga mengapresiasi langkah politik dari PSI ini. Politik tradisional yang ditampilkan PDIP, Golkar, PAN dan partai lama lainnya dinilai tidak pas bagi anak muda.

PSI melakukan langkah out of the box atau terobosan di luar kotak pemikiran politik saat ini dan hal itu menjadi jawaban bagi anak muda yang ingin berpolitik.

“Saya melihat PSI menunjukkan sebuah ideologi anak muda dalam berpolitik. Mereka menggunakan ideologi milenial dan politik modern dengan melihat kemampuan dan potensi bukan senioritas seperti di PDIP. Saya melihat masuknya Kaesang ke PSI jelas merugikan PDIP juga,” tegasnya.

Ardiyan juga menegaskan meski Joko Widodo melakukan manuver politik na-

mun dia tetap sebagai kader PDIP hanya saja hatinya mungkin sepenuh dulu.

“Kalau secara legal saya melihat tidak ada keinginan dari Jokowi untuk pindah partai atau menjadi ketua umum partai lain karena malah akan menurunkan statusnya sebagai mantan Presiden. Namun secara psikologis ada kemungkinan karena hal itu bisa dilihat dari saat ini saja,” tegasnya.

## Disambut Gembira

Bergabungnya Kaesang Pangarep putra Presiden Jokowi sebagai kader dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia menjadi kebanggaan bagi mereka semua. Mereka yakin sosok Kaesang sama seperti ayahnya, Joko Widodo yang mampu membawa perubahan Indonesia lebih maju lagi kedepannya.

Sebagai partai anak muda, PSI memang butuh orang-orang berkarakter seperti Kaesang. Sehingga diyakini partai ini akan menjadi besar di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep.

“Kita juga tahu latar belakang Kaesang pengusaha sukses, mulai dari Sang Pisan sampai urusan sepakbola. Sehingga kader PSI di daerah ini tentu menyambut baik kepemimpinan dari bro Kaesang ini sebagai simbol anak muda yang bisa menjadi panutan,” terang Wilfrit Thomas Edison Manalu Ketua Divisi Hukum DPD PSI Kota Palembang.

Kepemimpinan Kaesang ini juga sekali menegaskan kalau PSI merupakan partai tegak lurus dengan Jokowi. Sehingga mereka akan

taat pada perintah Presiden Jokowi tersebut sebab PSI ingin kembali memunculkan sosok Joko Widodo kembali di periode selanjutnya.

“Bagi kami PSI, Presiden Jokowi adalah sosok yang kami banggakan karena mampu membawa perubahan Indonesia lebih baik lagi. Ada banyak hal positif yang dapat kami ambil dari sosok Jokowi ini,” terang Thomas Manalu.

Bahkan sebagai bentuk fanatisme mereka pada Jokowi, PSI telah mengukuhkan diri sebagai partai Jokowiisme.

Bagi kader PSI, ada banyak keteladanan yang didapat dari Presiden Joko Widodo ini mulai dari perilakunya, cara kerjanya, sikap optimismenya serta kehidupannya yang sederhana.

“Jokowisme ini artinya kami tegak lurus dengan Jokowi. Makanya menjadi kebanggaan bagi kami karena dipimpin oleh bro Kaesang,” tegas dia.

Meski demikian secara politik mereka tidak sama dengan PDIP yang menjadi partai tempat Jokowi bernaung selama ini. Sehingga sempat mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden namun dukungan itu mereka cabut kembali.

Hingga saat ini kader PSI belum mengetahui kemana mereka akan berkoalisi di Pilpres 2024 mendatang. Meski sempat mendapat undangan dari Bacapres Prabowo Subianto mereka belum tahu akan berkoalisi dengan siapa.

“Itu urusannya DPP lah (soal koalisi). Namun bro Kaesang sempat menyatakan untuk koalisi ini PSI akan mencari denyut nadi mana yang paling kuat. Kemudian tentu harus ada win-win solution antara keduanya,” ucap Thomas.

Di Pemilu 2024 ini sendiri lanjut Thomas, mereka memang punya target namun tidak terlalu muluk-muluk sebab yang mereka tawarkan ke masyarakat itu program kerja dan bekerja untuk rakyat.

“Di PSI ini kami bekerja bersama masyarakat dan kerja nyata. Di Pemilu 2024 ini kami tidak akan bermain politik uang, solid sebagai partai anti korupsi dan lebih mengedepankan kerja nyata. Satu lagi kami tidak akan menjatuhkan partai apapun karena yang salah itu bukan partainya,” tegas Thomas. ●RDR







“Koalisi gemuk bukan jaminan untuk bisa menang mudah dalam Pilpres, Pemilu langsung. Apalagi angka swing dan undecided voters juga masih relatif tinggi”

*Surokim Abdussalam*

# KOALISI PRABOWO MAKIN GEMUK MENANG MUTLAK ATAU REMUK

**Partai Gerindra bersama Prabowo Subianto telah berhasil menggabungkan dukungan untuk menggaet partai parlemen dan non-parlemen bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).**

**T**ercatat, setidaknya sudah ada empat partai parlemen yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju, di antaranya Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

Selain itu, ada lima partai non-parlemen yang mendukung pencapresan Prabowo Subianto, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

PSI sendiri secara resmi belum mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Akan tetapi, setiap kegiatan yang dilakoni Koalisi Indonesia Maju, PSI tidak pernah absen. Contohnya ketika Partai Demokrat menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 17 September 2023.

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, mengungkapkan, gemuknya partai politik di Koalisi Indonesia Maju akan menyulitkan Prabowo Subianto dalam melakukan manuver politiknya ke depan.

Tidak hanya itu, Iwan menjelaskan, dengan gemuknya partai pendukung itu, pastinya akan semakin menguatkan gesekan-gesekan di internal Koalisi Indonesia Maju dalam menentukan strategi pemenangan.

“Banyaknya partai politik di kubu Koalisi Indonesia Maju akan lebih menyulitkan Prabowo dalam hal melakukan manuver-manuver politik, khususnya dalam menentukan strategi kemenangan dalam Pilpres 2024,” jelas Iwan kepada Info Indonesia, Kamis, 28 September 2023.

Dia mengatakan, Prabowo Subianto akan sulit mengakomodir kepentingan dari masing-masing partai pengusung. Apalagi, kata Iwan, ketika masing-masing partai pengusung itu memiliki kepentingan yang berbeda di Pilpres 2024.

“Karena untuk menentukan satu kesepakatan pasti tidak mudah karena di dalam koalisi tersebut banyak kepala dan kepentingan,” kata Iwan.

Di sisi lain, jika Prabowo Subianto dapat mengakomodir kepentingan dari masing-masing partai pendukung, tentu ini akan memberikan buah manis bagi mantan Danjen Kopasus dalam menjalankan mesin-mesin partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju.

“Apabila Prabowo lihai dalam mengorkestrasi mesin-mesin partai yang ada dalam KIM untuk memobilisasi suara dalam Pilpres, malahan ini bisa menjadi peluang besar Prabowo memenangkan Pilpres,” terang Iwan.

Sayangnya, hal itu akan sulit dilakukan. Apalagi, ada dua partai parlemen yakni PAN dan Partai Golkar di Koalisi Indonesia Maju. Kedua partai itu pastinya memiliki target-target tertentu di Pilpres mendatang.

Menurut Iwan, banyaknya partai yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju akan mempersulit proses konsolidasi dalam menentukan arah manuver politik. Apalagi, antara partai parlemen dan

non-parlemen memiliki target yang berbeda di konstelasi ke depan.

“Sehingga setiap keputusan rawan terjadi kebuntuan keputusan, bahkan deadlock,” jelas Iwan.

Belajar dari pengalaman di Pilpres sebelumnya, koalisi gemuk itu akan sangat sulit menentukan kandidat calon wakil presiden yang bakal mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Saat ini saja, PAN terus menyodorkan Menteri BUMN, Erick Thohir. Sementara Partai Golkar, tetap kukuh untuk menjadi ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai cawapres.

Dikatakan Iwan, Prabowo Subianto nantinya akan dihadapkan dengan sebuah kebingungan dalam menentukan calon pendampingnya. Apalagi, ketika partai non-parlemen yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju juga menyodorkan calon kandidat cawapres kepada Prabowo Subianto.

“Sulitnya untuk menentukan keputusan dalam menempatkan siapa yang akan menjadi wakil presiden mendampingi calon presiden yang ada. Karena, semua partai pasti berebut mengajukan proposal nama-nama kadernya untuk

bisa jadi calon wakil presiden yang mendampingi,” kata Iwan.

Dia menyampaikan, koalisi gemuk juga akan menyulitkan presiden untuk menentukan orang-orang yang bakal duduk di kursi eksekutif. Partai pendukung pastinya akan meminta jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.

“Pastinya partai-partai yang ada di dalam koalisi akan merongrong presiden untuk jabatan-jabatan kementerian tertentu dan ini akan menjadi permasalahan besar dalam koalisi yang gemuk,” ujar Iwan.

Sementara itu, peneliti politik dari Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, menilai, koalisi gemuk yang dibentuk Koalisi Indonesia Maju belum tentu bisa memenangkan kontestasi di 2024. Apalagi, swing voters di pemilu langsung akan sangat besar.

“Koalisi gemuk bukan jaminan untuk bisa menang mudah dalam Pilpres, Pemilu langsung. Apalagi angka swing dan undecided voters juga masih relatif tinggi. Parpol memang menentukan untuk proses kandidasi pendaftaran paslon. Namun, dalam pemilu daulat voters yang akan menentukan. Dan, ke mana suara undecided dan swing voters berlabuh akan menentukan,” kata Surokim.

Surokim juga menilai bahwa koalisi gemuk itu akan sangat sulit untuk melakukan konsolidasi. Dikatakan Surokim, di internal Koalisi Indonesia Maju akan terjadi tarik-menarik yang sangat kencang jelang pendaftaran calon presiden.

“Ya memang koalisi kian gemuk, kian sulit untuk akomodasi, demikian juga konsolidasi,” jelas Surokim.

Dia mengatakan, koalisi gemuk juga tidak bisa memastikan untuk mendapatkan suara yang besar di Pilpres. Penyebabnya, tidak banyak dari pemilih mereka memiliki sikap tersendiri dalam menentukan calon pemimpinnya.

“Sekali lagi koalisi gemuk bukan jaminan dalam sistem pemilu one man one vote dan tantangan pasca kandidasi parpol ya merebut suara rakyat, suara pemilih Indonesia, dan sekali lagi itu banyak faktor yang menentukan saat ini,” ungkap Surokim. ●RDO





“Dengan adanya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI, saya kira ini semakin terang menegaskan bahwa jangkar politik Pak Jokowi dan keluarga besarnya makin besar, makin lebar”

Nyarwi Ahmad



# KAESANG KETUM PSI UNTUK JOKOWI

**Terpilihnya Kaesang Pangraep menjadi Ketua Umum Partai Solideritas Indonesia (PSI) berhasil menarik perhatian publik. Keputusan itu dinilai hanya sebagai manuver untuk mendorong elektabilitas jelang Pemilu 2024.**

Kaesang diumumkan sebagai ketua umum menggantikan Giring Ganesha oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, dalam acara Kopdarnas di Gedung Jakarta Theatre, Senin, 25 September 2023.

Paska keputusan itu, sejumlah pihak kini mulai menelisik manuver yang dilakukan oleh PSI. Sebab, PSI yang telah berdiri sejak 2014 gagal lolos parlemen pada Pemilu 2019. Pada pemilu perdananya, PSI hanya meraih 2,65 juta suara atau 1,89 persen dari total suara sah nasional. Padahal, untuk lolos ke parlemen butuh minimal 4 persen suara nasional.

Oleh karena itu, publik pun kini mulai menerka-nerka apakah dengan menetapkan Kaesang menjadi ketua umum dapat mendongkrak elektabilitas partai hingga menembus ambang batas parlemen 4 persen.

Pengamat politik Universitas Gadjah Madha (UGM), Nyarwi Ahmad, menilai, keputusan PSI memilih Kaesang menjadi ketua umum merupakan strategi politik menjelang Pemilu 2024.

Nyarwi mengatakan, keputusan itu juga menjadi bentuk hadiah Grace Natalie dkk terhadap Kaesang karena telah berani mengambil keputusan yang berbeda dengan keluarga besarnya.

Menurut Nyarwi, pelantikan Kaesang menjadi ketua umum merupakan momen yang cukup bersejarah bagi PSI. Selain putra bungsu Jokowi, Kaesang dinilai mampu menjadi influencer dan brand ambassador untuk menarik simpati masyarakat di Pemilu 2024.

“Jadi saya kira momen ini cukup istimewa ya karena saat ini paling tidak PSI sudah mendapatkan sosok brand ambassador. Saya kira sangat potensial ya untuk berlaga dalam Pileg 2024, bahkan bisa mewarnai arah gerak PSI dalam Pilpres 2024,” ungkap Nyarwi, Kamis, 28 September 2023.

Nyarwi menyebut, masuknya Kaesang menjadi ketum partai dinilai dapat mempengaruhi arah sikap PSI dalam menghadapi tantangan menjelang Pemilu 2024. Selain itu, terpilihnya Kaesang juga menegaskan bahwa pengaruh Presiden Jokowi masih kental dalam menentukan arah perpolitikan Indonesia.

Selain itu, Kaesang sebagai pendatang baru dalam dunia politik juga dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan elektabilitas partai. Sebab, Kaesang sejak awal telah dibentuk citranya sebagai repre-

sentasi anak muda yang cukup berhasil berkariir, baik dalam dunia bisnis ataupun entertaint.

“Dengan adanya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI, saya kira ini semakin terang menegaskan bahwa jangkar politik Pak Jokowi dan keluarga besarnya makin besar, makin lebar,” ujar Nyarwi.

“Kita tahu keluarga Pak Jokowi banyak yang berkiprah di PDIP, tetapi juga salah satu anaknya itu kemudian ikut menjadi ketua umum partai baru yang kita lihat prospeknya potensial menjadi penantang partai-partai yang sudah mapan di parlemen hari ini,” sambung Nyarwi.

Nyarwi mengungkapkan, dengan hadirnya Kaesang sebagai ketua umum PSI saat ini dinilai bisa membawa partai tersebut menembus jalur parlemen. Sebab, Kaesang dapat menjadi magnet bagi anak muda yang jumlahnya akan mendominasi pada Pemilu 2024.

“Jadi PSI bisa bukan hanya lolos parliametary threshold, tetapi juga bisa mendapatkan kursi yang cukup besar di dalam parlemen,” kata Nyarwi.

Menurut Nyarwi, kondisi itu juga harus menjadi perhatian bagi partai-partai politik lain yang saat ini ikut Pemilu 2024. Sebab, PSI bisa saja menjelma menjadi kompetitor baru dalam persaingan menembus ambang batas parlemen 4 persen.

Nyarwi juga menilai, jika Kaesang mampu membentuk kesolidan di internal partai dengan kader lainnya, maka PSI bisa jadi

penantang baru bagi partai lain dalam berebut suara di parlemen.

Namun, Nyarwi menerangkan, meski PSI mendapat energi positif dengan terpilihnya Kaesang menjadi ketua umum, jika tak cermat dalam menjalankan strategi dan manufer politiknya, bukan tidak mungkin partai itu akan menelan pil pahit seperti Pemilu 2019 dengan tidak lolos parlemen.

“Jadi kita lihat nanti kira-kira seperti apa, sejauh mana PSI ini mampu menggarungi Pileg 2024 dan juga ikut mewarnai Pilpres 2024. Saya kira ini juga menarik

untuk kita simak,” terang Nyarwi.

Nyarwi menambahkan, keputusan meminaing Kaesang menjadi ketua umum, telah memberikan karpet merah bagi PSI untuk memanfaatkan jaringan politik Presiden Jokowi guna menyusun strategi jelang Pemilu 2024.

“Saya kira PSI kali ini bisa mendapatkan banyak peluang untuk memanfaatkan jaringan politik dan pengaruh keluarga Presiden Jokowi. Kemudian bisa jadi ini menjadi ruang-ruang baru bagi para politisi muda untuk berkiprah di sana,” ujar Nyarwi.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai, target lolos ambang batas parlemen 4 persen tidaklah mudah ditempuh oleh PSI apabila hanya mengandalkan sosok Kaesang.

Menurut Efriza, potensi ketidaksukaan kader lain terhadap Kaesang yang secara instan diangkat menjadi ketua umum bisa menimbulkan riak di internal partai.

Selain itu, dinamika yang sebelumnya terjadi di internal partai, di mana sejumlah kader tak suka dengan Giring pun juga dapat membuat tingkat kesolidan partai tersebut anjlok jelang Pemilu 2024.

Oleh sebab itu, selaku ketua baru, Kaesang harus bekerja

lebih ekstra dalam menyelesaikan situasi di internal. Terlebih untuk membangun kembali energi dan kekompakan guna menyusun strategi politik jelang Pemilu 2024.

“Jadi tak mudah jika hanya Kaesang. Sebab, PSI sempat terhuyung karena ditinggal kader potensial dan terjadi riak di internal, belum lagi masalah kurang respeknya kader PSI terhadap Giring yang dianggap membuat PSI merosot drastis dalam elektabilitas,” ujar Efriza.

Efriza melihat, momen terpilihnya Kaesang menjadi ketua belum tepat karena hanya merupakan hasrat politik dari sege-lintir orang. Selain itu, para kader PSI yang tidak pololer juga akan menambah pekerjaan Kaesang dalam memetakan strategi memenangkan Pileg 2024.

“Kehadiran Kaesang waktunya tak tepat banget. Diyakini itu para caleg PSI tidaklah semuanya populer, malah memungkinkan kadernya hanya berkategori B, biasa saja, baik dari segi modal sosial, politik, logistik maupun tokoh populer di masyarakat,” ujar Efriza.

“Ini menunjukkan Kaesang harus kerja ekstra keras, cepat, cerdas, untuk segera memahami kelemahan PSI, tak cukup jika waktunya untuk mempelajari masalah PSI terlebih dahulu, dia harus bisa learning by doing, berlari dengan belajar,” sambung Efriza.

Efriza menilai, Kaesang yang baru saja terjun di politik harus memiliki intuisi khusus untuk membawa kapal mengarungi perjalanan dengan intensitas ombak yang cukup tinggi di Pemilu 2024.

Sebab, sebagai partai yang tidak lolos parlemen di Pemilu 2019, Kaesang harus membentuk strategi khusus untuk meraih kemenangan pada Pileg 2024, khususnya menembus ambang batas parlemen 4 persen.

Efriza menambahkan, PSI akan meraih hasil manis jika Kaesang dapat dibantu kekuatan Presiden Jokowi dalam menyusun desain politik menjelang Pileg dan Pilpres 2024.

“Nah, solusi tercepat memang Kaesang harus berharap Presiden Jokowi turut membantunya, baik sebagai ayah dan penguasa politik, untuk membantu melakukan desain strategi politik agar PSI lolos di parlemen. Inilah tantangannya Kaesang mengarsiteki upaya kelolosan PSI di Senayan,” tandas Efriza. ●RDO







“Kalau di PBB banyak tokoh-tokohnya di nasional maupun daerah, maka PBB bisa saja menjadi partai yang kuat, bisa bersaing dengan partai-partai yang lain”

Ujang Komarudin

# PBB MASIH TERANCAM GAGAL KE PARLEMEN

**Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai salah satu pecahan Partai Masyumi, telah gagal masuk parlemen sebanyak empat kali, yakni pada Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Nasib serupa diperkirakan akan berulang di Pemilu Serentak 2024.**

PBB yang eksis pada masa Reformasi, mendapuk Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua umum periode 1998-2005 dan berhasil memperoleh 2,84 persen suara. Jumlah itu membuat PBB menempatkan 13 perwakilannya menjadi anggota parlemen.

Namun, setelah melalui beberapa kali pemilu selanjutnya, PBB tak lagi eksis di parlemen, meski Yusril sebagai sosok yang menduduki pucuk pimpinan partai ini punya track record yang tidak biasa. Pasalnya, Yusril merupakan pakar hukum tata negara yang malang melintang sebagai pejabat pemerintahan.

Bahkan, sebelum mendirikan PBB, Yusril diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai penulis pidato presiden sejak 1996 hingga 1998. Setelah itu, ketika Presiden RI silih berganti, jabatannya pun ikut berganti. Dia pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong; Ketua Komisi Yudisial; dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu.

Kini, Yusril kembali menjabat sebagai Ketua Umum PBB hasil Muk-tamar IV 2015. Dia didampingi Afriansyah Noor sebagai Sekretaris Jenderal yang kini menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Indonesia Maju pimpinan

Presiden Joko Widodo periode kedua.

Di bawah kepemimpinan Yusril dan Afriansyah Noor, PBB berhasil memenuhi syarat-syarat sebagai peserta Pemilu 2024. Bahkan, keikutsertaan dalam Pilpres 2024 juga telah dikemukakan dalam acara Milad Ke-25 PBB di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, 30 Juli 2023. Pada momen itu, PBB juga menyatakan dukungan kepada Ketuan Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi calon presiden untuk Pilpres 2024, sekaligus menyatakan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Posisi PBB jelang gelaran Pemilu Serentak 2024 yang melangsungkan pemilihan 5 kotak, yakni Pilpres, Pileg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta DPD RI, masih memunculkan keraguan di publik soal peluang lolosnya di parlemen.

Beberapa indikator yang memperkuat dugaan tersebut dikemukakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, yang mengacu pada kompleksitas pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dan posisi PBB dalam peta politik kepartaian dan koalisi pilpres yang telah terbentuk hingga hari ini.

Menurutnya, PBB sebagai salah satu partai Islam tertua di Indonesia sebenarnya punya kans menduduki parlemen, seperti keberhasilan Pemilu 1999. Karena, ada faktor sejarah yang tak bisa dianggap enteng. Tetapi, Ujang menganggap ada satu faktor krusial yang menghambat kelolosan di parlemen.

“Variabel masalahnya banyak. Salah satunya mungkin soal ketokohan yang harus juga merata di banyak daerah. Kan saat ini banyak partai yang merekrut tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh bagus di daerah-daerah. Ketokohan yang bagus di daerah harus juga hadir ada di PBB,” kata Ujang kepada Info Indonesia, Jumat, 29 September 2023.

Ujang memperhatikan, corak politik pasca Reformasi berubah menjadi patronase alias ketokohan yang dijadikan tolok ukur dalam mengusung dan memilih calon pemimpin dan/atau wakil rakyat. Sehingga, unsur tersebut dalam partai begitu penting agar berpeluang menduduki kursi kekuasaan dari hasil Pemilu.

“Sehingga, dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih mengikuti patronase, maka itu harus dibentuk di daerah. Kalau di PBB banyak tokoh-tokohnya di nasional maupun

daerah, maka PBB bisa saja menjadi partai yang kuat, bisa bersaing dengan partai-partai yang lain,” tutur Ujang.

Pengajar ilmu politik di Universitas Al-Azhar Indonesia itu menilai, faktor kedua yang membikin PBB tersendat masuk parlemen adalah iklim demokrasi yang semakin carut marut. Salah satu bentuknya, disebutkan Ujang, adalah makin maraknya politik uang sebagai strategi meraup suara pemilih dalam Pemilu.

“Soal pemilih kita yang masih diwarnai dengan money politic, mungkin PBB ini partai yang masih garis ideologinya ke arah Masyumi, atau karena tidak cukup punya kekuatan banyak uang untuk bersaing dengan partai lain. Karena faktor itu pula maka PBB agak tertatih-tatih dalam menghadapi setiap Pemilu, karena yang dilawan adalah kekuatan uang yang dimiliki partai-partai lain,” urainya.

Ujang meyakini, dua faktor utama tersebut yang menjadi problem bagi PBB. Namun menurutnya, jika Pemilu 2024 lebih bersih dari yang sebelumnya, misalnya tidak ada money politics, maka PBB juga akan menjadi partai yang besar, atau paling tidak partai kelas menengah.

“Hanya karena Pemilu kita diwarnai money politics, maka PBB tidak punya cukup uang untuk bisa bersaing dalam konteks persoalan pertarungan uang itu di Pemilu. Tentu dalam menghadapi Pemilu 2024 perlu strategi tersendiri agar PBB paling tidak bisa naik suaranya di Pemilu nanti,” sambungnya.

Kendati begitu, Ujang masih melihat peluang PBB bisa masuk parlemen pasca Pemilu Serentak 2024 dari pilihan politiknya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto. Sebab, dia memandang, sosok Menteri Pertahanan itu tengah digandrungi banyak segmen pemilih, sehingga membuka peluang bagi PBB memperoleh coat-tail effect atau efek ekor jas.

“Mungkin jalan tengah, jalan terbaik PBB di Prabowo. Bisa saja sedikit besar akan mendapatkan efek elektoral. Tetapi, sebesar apa keberkahannya, efek elektoralnya, ya kita harus lihat ke depan. Kalau saya sih melihat akan ada dampaknya dari elektoral itu. Ya asalkan Pak Prabowo juga berkampanye untuk PBB, dan masuk ke basis-basis massa PBB, dan mempromosikan PBB. Itu yang mesti dilakukan Prabowo untuk menambah elektoral dari PBB itu,” tandas Ujang. RDO





**“Perubahan-perubahan elektabilitas masih mungkin terjadi karena masih tingginya angka pemilih yang mungkin mengubah pilihannya (swing voters) sebesar 19,6 persen”**

**Riko Arbi**



# ANIES NGE GAS NAIKKAN ELEKTABILITAS

**Elektabilitas bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, terus mengalami kenaikan elektoral pada Agustus hingga September 2023. Di sisi lain, meski masih unggul, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo cenderung stagnan, bahkan mulai menurun.**

Berdasarkan hasil survei terbaru dari Indo Riset, kenaikan elektabilitas Anies Baswedan dari Agustus hingga September 2023 adalah sebesar 3,2 persen.

“Elektabilitas Anies Baswedan mengalami kenaikan dari 22 persen pada Agustus 2023 menjadi 25,2 persen pada September 2023,” kata peneliti Indo Riset, Riko Arbi, Senin, 25 September 2023.

Sementara itu, elektabilitas dari bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, selama beberapa bulan terakhir mengalami penurunan. Bahkan, turunnya begitu signifikan mencapai lebih dari 4 persen.

“Elektabilitas Prabowo Subianto mengalami penurunan dari 38,3 persen pada Agustus 2023 menjadi 34,3 persen pada September 2023,” jelas Riko.

Sedangkan, elektabilitas bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo, terpantau stagnan dari Agustus hingga September 2023. Meski, ada kenaikan, namun jumlahnya tidak begitu signifikan.

“Elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami stagnansi dari 34,3 persen pada Agustus 2023 menjadi 34,4 persen pada September 2023,” kata Riko.

Riko pun menjelaskan, Anies Baswedan yang resmi mendeklarasikan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden menjadi penyebab reboundnya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Apalagi, ketika ketika bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Koalisi Perubahan yang diisi Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Efek dari deklarasi pasangan cawapres Muhaimin Iskandar dan bergabungnya PKB ke koalisi,” jelas Riko.

Tidak hanya itu, berdasarkan daerah pemilihan, Anies Baswedan unggul di beberapa wilayah yang pemilih cukup besar, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Elektabilitas Anies di Jabar mengalami kenaikan dari Agustus hingga September 2023, yakni dari 24,7 persen menjadi 31,6

persen. Sementara itu, di Jateng dan DIY, elektabilitas Anies Baswedan meningkat dari 12,8 persen menjadi 14,4 persen. Lalu, untuk Jatim kenaikannya begitu signifikan dari 12,8 persen menjadi 22,2 persen.

“Terjadi kenaikan dukungan pemilih di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah-DIY pada Anies baswedan dibandingkan survei lalu. Sumbangan yang terbesar didapatkan dari kenaikan elektabilitas di Jawa Timur,” beber Riko.

Menurut Riko, kenaikan elektabilitas Anies Baswedan juga sangat dipengaruhi dukungan dari pendukung Partai NasDem, PKS, dan PKB.

“Membesarnya dukungan pemilih partai-partai koalisi ke Anies Baswedan, baik NasDem, PKS, serta PKB,” kata Riko.

Selain itu, Riko juga menjelaskan terkait penurunan elektabilitas Prabowo Subianto. Dia mengatakan, dukungan pemilih di Sumatera Barat dan Jabar terus mengalami penurunan yang dratis.

Pada Agustus 2023, elektabilitas Prabowo Subianto di Sumatera mencapai 48,0 persen. Namun, pada September 2023 menjadi 34,0 persen.

Sedangkan, di Jabar pada Agustus 2023 elektabilitas Prabowo Subianto sebesar 46,0 persen. Lalu, pada September 2023 turun menjadi 40,5 persen.

“Elektabilitas Prabowo Subianto mengalami penurunan karena terjadinya penurunan di basis suara Prabowo yaitu di Sumatera dan Jawa Barat,” kata Riko.

Lebih lanjut, Riko menjelaskan, turunnya elektabilitas mantan Danjen Kopasus tersebut karena hingga saat ini Presiden Jokowi belum memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto.

“Penurunan juga dapat dianalisis dari tidak ada lagi sinyal dukungan yang jelas dari Jokowi,” terang Riko.

Riko juga menjelaskan penyebab dari elektabilitas dari Ganjar Pranowo yang stagnan. Diketahui, elektabilitas Ganjar Pranowo di Jateng dan Bali turun. Pada Agustus 2023, elektabilitas Ganjar di Jateng menyentuh 70 persen. Berselang satu bulan turun menjadi 65,6

persen.

Sedangkan untuk di Bali, penurunannya tidak begitu drastis, yakni dari 51,7 persen pada Agustus 2023 menjadi 48,3 persen pada September 2023.

Di sisi lain, suara Ganjar di Jakarta-Banten dan Jabar mengalami kenaikan. Di Jakarta-Banten, elektabilitas Ganjar Pranowo menyentuh 16,0 persen pada Agustus 2023 dan menjadi 21,0 persen pada September 2023.

Sementara itu, di Jabar, pada Agustus 2023, elektabilitas Ganjar sebesar 18,1 persen. Kemudian, naik pada September 2023 menjadi 22,3 persen.

“Elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami stagnansi karena beberapa provinsi mengalami penurunan seperti Bali-Nusa dan Jawa Tengah. Tetapi, juga mengalami kenaikan seperti di Jakarta-Banten dan Jawa Barat,” ujar Riko.

Riko menambahkan, stagnasi elektabilitas dari Ganjar Pranowo juga disebabkan oleh PDIP sampai saat ini tidak kunjung mengumumkan cawapres untuk mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

“Stagnansi juga dapat dianalisis dari kesulitan PDIP mencari

cawapres,” kata Riko.

Dikatakan Riko, perubahan elektabilitas akan sangat mungkin terjadi. Sebab, berdasarkan survei Indo Riset, jumlah swing voters masih sangat besar. Sehingga, sangat memungkinkan elektabilitas dari tiga calon tersebut mengalami kenaikan maupun penurunan.

“Perubahan-perubahan elektabilitas masih mungkin terjadi karena masih tingginya angka pemilih yang mungkin mengubah pilihannya (swing voters) sebesar 19,6 persen,” tegas Riko.

Adapun waktu pengumpulan data pada survei ini dilakukan pada 11-18 September 2023. Survei dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sample sebesar 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Margin of Error (MoE) survei ini sebesar +/- 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Penarikan sample sepenuhnya dipilih secara acak menggunakan metode multi-stage random sampling yang mempertimbangkan proporsi antara jumlah penduduk dengan distribusi sample per provinsi, penduduk di pedesaan dan perkotaan, serta proporsi laki-laki dan perempuan (50:50).

Primary Sampling Unit (PSU) dalam survei ini adalah desa/kelurahan. Sebanyak 124 PSU dipilih secara proporsional, yang terdiri dari 116 PSU dengan target 10 responden/PSU dan 8 PSU dengan target 5 responden/PSU sesuai dengan proporsi jumlah penduduk.

Pada setiap PSU (target 10 sample) dipilih secara acak 5 RT, di mana pada masing-masing RT dipilih 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Sementara pada PSU dengan 5 sample, dipilih 2 RT.

Proses kendali mutu dilakukan dengan mewajibkan enumerator melaporkan menggunakan sharelive location, spotcheck lapangan sebesar 25 persen oleh koordinator propinsi, serta call-back oleh tim pusat sebesar 75 persen. ●RDO

